

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

RENSTRA 2025 - 2029

**PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

Jl. Bimasakti No.1 Telp/Fax. (0274) 515876 Yogyakarta 55221

E-mail: lingkunganhidup@jogjakota.go.id

Website : lingkunganhidup.jogjakota.go.id

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat tersusun. Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini telah mengacu pada RPJMD Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029, Renstra DLHK DIY Tahun 2025-2029 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, serta dokumen terkait lainnya seperti KLHS maupun RTRW Kota Yogyakarta.

Telah menjadi komitmen dari DLH Kota Yogyakarta untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, agar dapat mewujudkan Kota Yogyakarta yang berwawasan lingkungan dengan masyarakatnya yang peduli pada pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Ke depan, setidaknya untuk tahun 2025-2029, DLH bertekad untuk memastikan kondisi Kota Yogyakarta berada pada toleransi kualitas lingkungan yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia. Tidak semua persoalan lingkungan akan bisa diselesaikan, namun setidaknya apa yang telah menjadi amanat yang tertuang dalam RPJMD Kota Yogyakarta akan dapat tercapai melalui langkah-langkah pencapaian dari DLH yang terangkum dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029 ini.

Ucapan terimakasih disampaikan kepada berbagai pihak sehingga Dokumen Rencana Strategis DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Akhir kata semoga Allah SWT memberikan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat memenuhi setiap kinerja yang telah direncanakan.

Yogyakarta, 15 September 2025

Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Kota Yogyakarta



RAWAN TALFIQ, S.I.P., M.Si.

NIP: 197303021992031004

DAFTAR ISI

COVER

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBARiv

BAB I PENDAHULUAN..... 1

 1.1 Latar Belakang..... 1

 1.2 Landasan Hukum 3

 1.3 Maksud dan Tujuan..... 4

 1.4. Sisematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 8

 2.1 Gambaran Pelayanan Daerah 8

 2.2 Permasalahan 18

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN..... 23

 3.1 Tujuan..... 23

 3.2 Sasaran 23

 3.3 Strategi dan Penahapan Renstra..... 25

 3.4 Arah Kebijakan 29

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 33

 4.1 Program..... 33

 4.2 Kegiatan 35

 4.3 Sub Kegiatan 56

 4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah 91

 4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah 95

 4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) 96

BAB V PENUTUP 97

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan 10

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan..... 11

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional..... 12

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-202415

Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah 21

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta 25

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030..... 26

Tabel 3. 3 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta ... 29

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD.....39-55

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta 70

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta..... 91

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta 95

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta 96

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 9

Gambar 2.1 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium
Pengujian Kualitas Lingkungan 9

Gambar 2.1 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana
Prasarana dan Perbengkelan..... 10

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta38

Gambar 4. 2 Peta Zonasi Pemeliharaan Taman dan Perindang.....59

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu agenda utama dalam perencanaan pembangunan nasional maupun daerah. Lingkungan hidup merupakan aspek fundamental yang memengaruhi kualitas hidup masyarakat, daya saing daerah, serta keberlanjutan sumber daya alam. Dinamika pembangunan yang terus meningkat, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan aktivitas ekonomi sering kali menimbulkan tekanan terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan. Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam bidang lingkungan hidup menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Dalam konteks tersebut, Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pengelolaan lingkungan yang terpadu, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 tahun ke depan yang berisi visi yang akan dituju oleh Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam beberapa misi yang mempunyai tujuan dan sasaran yang jelas disertai dengan arah kebijakan dan strategi yang dituangkan dalam berbagai program dan kegiatan untuk pencapaiannya. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta. Dokumen Renstra dirumuskan dalam kerangka pandangan strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal maupun internal, dan bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, kegiatan serta target indikator kinerja yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah selama lima tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya, baik untuk mendukung visi misi kepala daerah maupun untuk memperbaiki kinerja layanan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang berpedoman kepada RPJMD.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Seluruh dokumen perencanaan tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sebuah sistem perencanaan pembangunan yang merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan keterkaitan yang erat antara satu dengan lainnya.

Sesuai dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu ketugasan Kepala Daerah di bidang Lingkungan Hidup. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD, sehingga tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Selain hal tersebut Rencana Strategis DLH ini dimaksudkan untuk lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program dan kegiatan dalam rangka mendukung mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Pemerintah Kota Yogyakarta, yakni *“Mewujudkan Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa yang Berwawasan Lingkungan.”*. Renstra yang telah tersusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang di dalam Rencana Kerja (Renja), sehingga penyusunan indikator kinerja, kelompok sasaran, program, kegiatan, pagu indikatif maupun prakiraan maju yang tertuang di dalam Renja Perangkat Daerah akan selaras dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.

Selain itu, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 dilakukan untuk menjabarkan arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029, sekaligus selaras dengan RPJPN 2025–2045 dan SDGs (*Sustainable Development Goals*). Dokumen Renstra ini menjadi pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan selama lima tahun ke depan.

Penyusunan Renstra juga dilatarbelakangi oleh adanya tantangan lingkungan hidup yang semakin kompleks, seperti meningkatnya volume timbunan sampah, pencemaran air dan udara, kerusakan ekosistem, perubahan iklim, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Di sisi lain, terdapat peluang berupa perkembangan teknologi ramah lingkungan, peningkatan regulasi nasional, serta semakin tingginya partisipasi publik dalam isu lingkungan.

Dengan demikian, penyusunan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi instrumen perencanaan yang visioner,

terukur, dan adaptif dalam menghadapi tantangan lingkungan hidup, sekaligus mendukung pencapaian pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundangan yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (1) yang menjamin hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta Pasal 33 ayat (4) mengenai penyelenggaraan perekonomian yang berwawasan lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 442);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagai dasar utama pengelolaan lingkungan hidup secara terpadu dan berkelanjutan.
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19).
9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2025-2045;
16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
18. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini dimaksudkan sebagai penjabaran dalam mencapai tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta 2025-2029 dari aspek urusan lingkungan hidup dengan memberikan gambaran ruang lingkup kewenangan dan urusan, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 2025-2029 yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

Adapun penyusunan Renstra DLH Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 ini bertujuan untuk menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029, yaitu :

1. Menetapkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan DLH Kota Yogyakarta dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya selama periode tahun 2025-2029.
2. Menetapkan program beserta indikasi kegiatan dan sub kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta untuk periode tahun 2025-2029;
3. Menjadi pedoman dalam implementasi strategi dan visi misi Pemerintah Kota Yogyakarta
4. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan Perangkat Daerah dalam jangka 5 Tahun;
5. Menjadi kerangka dasar dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah guna menunjang pencapaian target kinerja pembangunan daerah terutama pada penyusunan RENJA yang bersifat tahunan.
6. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah setiap tahunnya

1.4. Sisematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi organisasi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Struktur perangkat daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah, Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan, dan Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

2.2 Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah, rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

3.1 Tujuan

Pada bagian ini menjelaskan terkait tujuan dari Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029.

3.2 Sasaran

Sasaran menjelaskan terkait hasil yang diharapkan dari suatu tujuan dan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

3.3 Penahapan Renstra

Pada bagian ini menjelaskan terkait Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

3.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini menjelaskan terkait Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang

4.1 Program

Pada bagian ini menjelaskan terkait program-program yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.2 Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan terkait kegiatan-kegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.3 Sub Kegiatan

Pada bagian ini menjelaskan terkait subkegiatan yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Pada bagian ini menjelaskan terkait Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah beserta pemetaan program strategis Walikota yang terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024-2029.

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan terkait Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Pada bagian ini menjelaskan terkait Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

BAB V Penutup

Pada bagian ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Daerah

Pada bagian ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

A. Tugas dan Fungsi Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta, maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

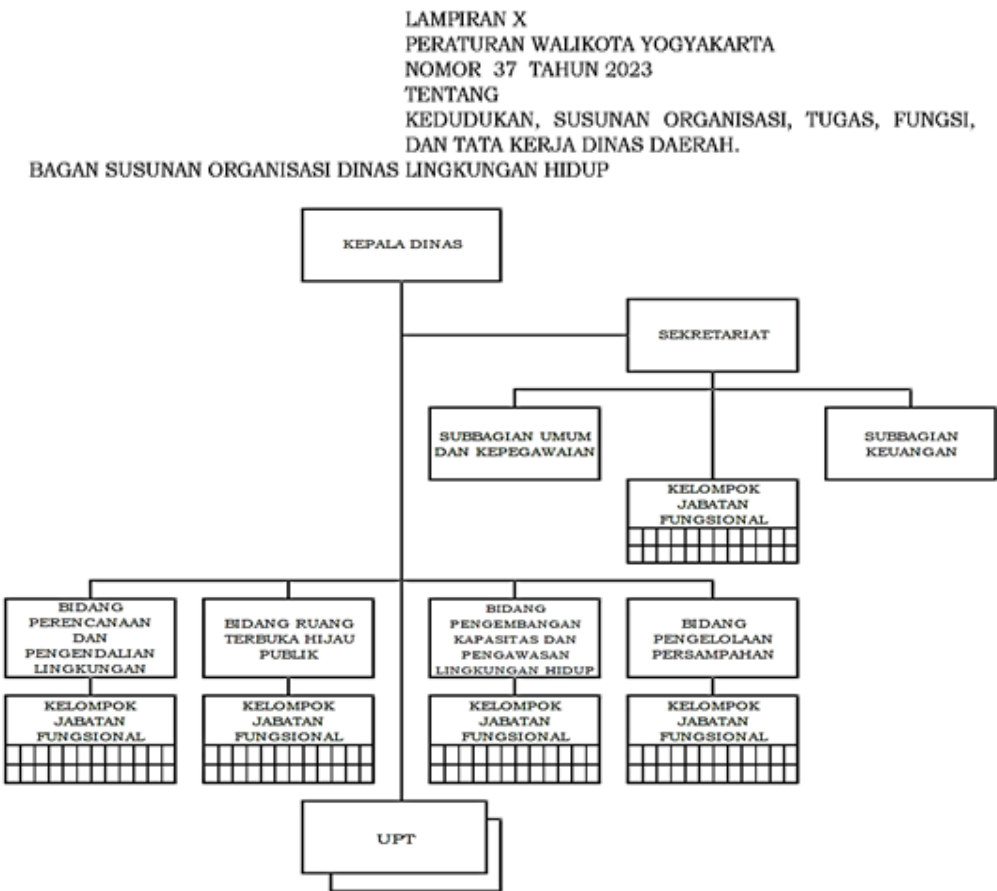
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Daerah. Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan Tugas Pembantuan di bidang lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Perangkat Daerah

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup;
- b. Sekretariat, terdiri dari :

- 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- 2. Sub Bagian Keuangan; dan
- c. Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik;
- e. Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pengawasan Lingkungan Hidup;
- f. Bidang Pengelolaan Persampahan;
- g. Unit Pelaksana Teknis;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu.



Gambar 2.1 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta



Gambar 2.1 2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Kualitas Lingkungan



Gambar 2.1 3 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Sarana Prasarana dan Perbengkelan

2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

A. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data kepegawaian per 31 Juli 2025, jumlah pegawai DLH sebanyak 1.123 orang, terdiri dari 155 orang (13,81%) adalah PNS, 2 orang (0,18%) adalah PPPK, 48 orang (4,27%) adalah PJLOP, 917 orang (81,73%) adalah tenaga *outsourcing*.

Berdasar Kepangkatan/Golongan : Pegawai Golongan IV : 8 orang (4,09%); Pegawai Golongan III : 81 orang (51,59%); Pegawai Golongan II : 66 orang (42,03%), Pegawai PPPK Golongan IX : 1 orang (0,63%), dan Pegawai PPPK Golongan VII : 1 orang (0,63%).

Tabel 2. 1 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
1	Doktor (S3)	0	0	0	0
2	Master (S2)	7	6	13	10
3	Sarjana (S1/D4)	8	22	30	48
4	Diploma (D3)	3	6	9	35
5	SLTA	75	1	76	159

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Jumlah Ideal
6	SMP	22	0	22	0
7	SD	7	0	7	0
	Total	121	36	157	252

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Berdasarkan jenjang pendidikan sebanyak 13 orang memiliki gelar S2, sebanyak 30 orang memiliki gelar S1/D4, sebanyak 9 orang memiliki gelar D3, sebanyak 76 orang berpendidikan SMA/Sederajat, sebanyak 22 orang berpendidikan SMP/Sederajat dan sebanyak 7 orang berpendidikan SD/Sederajat.

Tabel 2. 2 Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
1	IV C	0	0	0
2	IV B	0	1	1
3	IV A	4	3	7
4	III D	4	4	8
5	III C	1	0	1
6	III B	1	3	4
7	III A	52	17	69
8	II D	12	0	12
9	II C	32	6	38
10	II B	1	0	1
11	II A	14	0	14
12	I D	0	0	0
13	PPPK gol IX	0	1	1
14	PPPK gol VII	0	1	1
	Total	121	36	157

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Selain itu Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 48 orang tenaga PJLOP dan 917 tenaga *outsourcing* baik untuk urusan administrasi maupun untuk tenaga teknis lapangan pada pekerjaan pembersihan sungai, penyapuan jalan, pengangkutan sampah, pemeliharaan taman, dan pemeliharaan pohon perindang

B. Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran dan operasional berupa bangunan gedung kantor dan kantor sektor-sektor, bangunan gedung Laboratorium Lingkungan, peralatan dan perlengkapan kantor, serta kendaraan dinas dan kendaraan operasional. Sarana dan prasarana tersebut dalam kondisi baik dan layak dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 2. 3 Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Operasional

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	Bangunan kantor dinas	1 unit
2	Bangunan kantor sektor kebersihan	7 unit
3	Bangunan laboratorium lingkungan	1 unit
4	Bangunan Unit Pengolahan Sampah (UPS)	6 unit
5	Peralatan komputer : PC, Laptop, Printer, dll	160 unit
6	Perlengkapan kantor dan mebelair	716 unit
7	Kalkulator	14 buah
8	Rak Besi Siku	22 unit
9	Lemari Kaca	34 unit
10	Monitor LED	6 unit
11	Dispenser	8 unit
12	Bracket Standing	2 unit
Bidang Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)		
1	Dump truck	5 unit
2	Sky truck / pruning	2 unit
3	Truk tangki penyiraman	9 unit
4	Motor roda tiga	13 unit
5	Gergaji mesin	14 unit
6	Mesin pemotong rumput	18 unit
7	Mesin pompa air	28 unit
8	Mobil / pick up	8 unit
9	Alat Pencacah Dahan	2 unit
10	Composter	48 unit
11	Wheel Bin / Tempat Sampah	3 unit
12	Gunting Dahan/ Tree Prunner	6 unit
13	Rambu Peringatan	8 unit
14	Traffic Cone	40 unit
15	Concrete Breaker/ Jack Hammer	2 unit
16	Tali Tambang	150 meter
17	Gerobak Dorong	1 unit
18	Steam Cleaner	1 unit
19	Tangga Teleskopik	1 unit
20	Air Compressor	1 unit
21	Kebun Bibit	1 unit
22	RTHP Lingkungan Permukiman	64 unit
Bidang Pengelolaan Persampahan (PP)		
1	Gerobak Sampah	54 unit
2	Kendaraan Roda 3 sampah	38 unit
3	Bin Compactor	68 unit
4	Dump Truck	25 unit
5	Arm Roll Truck	6 unit

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah
6	Pick Up	5 unit
7	Container Sampah	18 unit
8	Transfer Depo	14 unit
9	TPS Permanen	2 unit
10	Compactor	20 unit
11	Road Sweeper	2 unit
12	Mesin Pencacah Organik	10 unit
13	Mesin Press Hidrolis	4 unit
14	Mesin Pencacah Kertas	1 unit
15	Wood Chipper	9 unit
16	Pick Up Pengurangan Sampah	2 unit
17	Kendaraan Roda 3 Pengurangan Sampah	1 unit
18	Fork Lift	2 unit
19	Wheel Loader	1 unit
20	Incenerator	7 unit
21	Modul RDF	3 unit
22	Belt Conveyor	16 unit
23	Bin Sampah	45 unit
24	Gerobak Dorong / Angkong	12 unit
25	Pengangkat Bak Sampah Hidrolis	3 unit
26	Timbangan Jembatan	1 unit
27	Alat Pencacah Plastik	2 unit
28	Rak Besi Magot	5 unit
29	Laci Box/ Biopon Magot	20 unit
30	Genset	4 unit
31	Crusher / Mixer Sampah	3 unit
32	Belt Conveyor	2 unit
33	Alat Ukur Kadar Air	3 unit
34	Biofil Lindi	17 unit
35	Mesin Cacah Pilah Otomatis / Gibrik	7 unit
36	Mesin Cacah Anorganik	3 unit
Bidang Perencanaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup (PPLH)		
1	Kendaraan Roda 2	2 unit
2	Kendaraan Roda 3	5 unit
3	GPS	1 unit
4	Borehole Camera	1 unit
5	Trash Barrier	58 meter
6	Mesin Potong Rumput	4 unit
7	Gergaji Mesin	2 unit
Bidang PKPLH		
1	Lemari Es	1 unit
UPT Laboratorium Lingkungan Hidup		
1	Mikropipet	1 unit
2	Alat Uji Emisi Kendaraan Diesel	1 unit

(Sumber : DLH Kota Yogyakarta, 2025)

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mengelola 6 bangunan Unit Pengolah Sampah (UPS), yang terdiri dari UPS Nitikan, UPS Kranon, UPS Karangmiri, UPS Giwangan, UPS Sitimulyo (2 unit). Sektor kebersihan tersebar di 7 lokasi yaitu Sektor Malioboro dan Kranggan, Sektor Krasak, Sektor Gunungketur, Sektor Krasak, Sektor Ngasem, Sektor Gading, Sektor Tungkak, dan Sektor Kotagede. DLH Kota Yogyakarta mempunyai 7 unit insinerator, yang terletak di Sitimulyo sebanyak 5 unit dan Giwangan

sebanyak 2 unit. DLH juga mengelola kebun bibit yang berlokasi di Gg. Empu Gandring VI Pandeyan Umbulharjo Kota Yogyakarta. Di tahun 2025 ini, DLH telah memasang alat perangkap sampah di sungai (*trash barrier*) terdapat pada sungai Code dan Sungai Winongo

2.1.3 Kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengetahui capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, dilakukan berdasarkan : (1) Pencapaian sasaran strategis Renstra DLH 2023-2026; (2) Pencapaian SPM; dan (3) Pencapaian kinerja program dan kegiatan.

1. Analisis Kinerja Pelayanan PD Berdasarkan Pencapaian Sasaran Strategis Renstra DLH Tahun 2017-2022 dan RPD Tahun 2023-2026
Penilaian capaian kinerja dari target sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja berdasar target Renstra dan RPD Perangkat Daerah periode sebelumnya.

Berdasarkan Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2017-2022, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang terbagi ke dalam 5 (lima) indikator kinerja sasaran. Namun, pada tahun 2018 dan 2019 terdapat perubahan salah satu sasaran strategis OPD terkait persampahan. Setelah dilakukan pencermatan didapatkan hasil bahwa realisasi sasaran OPD tergolong baik dikarenakan banyak realisasi indikator sasaran yang mencapai target ataupun mendekati target.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, terdapat 3 (tiga) sasaran strategis OPD yang terbagi ke dalam 3 (tiga) indikator kinerja sasaran. Namun, pada tahun 2024 terdapat perubahan/ revidi salah satu sasaran strategis OPD yaitu di tahun 2023 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menjadi Sasaran Strategis Meningkatnya Capaian Kualitas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup. Setelah dilakukan pencermatan didapatkan hasil bahwa realisasi sasaran OPD tergolong baik dikarenakan banyak realisasi indikator sasaran yang mencapai target ataupun mendekati target.

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Indikator Kinerja Utama																
1.	Indeks Kulit Air (IKA)	Persen	50,80%	39,79%	78,33%	51,00%	38,44%	75,38%	51,20%	38,54%	75,27%	-	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Persen	86,40%	86,97%	100,66%	86,9%	90,70%	104,38%	87,40%	90,74%	103,83%	-	-	-	-	-	-
	Persentase luasan RTH Publik dari minimal RTH Publik 20% luas Kota Yogyakarta	Persen	29,85%	40,56%	135,88%	30,02%	40,60%	135,25%	40,60%	40,64%	100,10%	-	-	-	-	-	-
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,66%	52,05%	95,23%	-	-	-
	Persentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,20%	62,60%	100,64%
2.	Persentase pengurangan sampah	Persen	18,43%	18,88%	102,43%	18,65%	23,50%	126,02%	26,00%	27,95%	107,50%	-	-	-	-	-	-
	Persentase pengangkutan sampah	Persen	99,32%	100,47%	101,16%	99,32%	101,20%	101,89%	99,47%	97,41%	97,93%	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Capaian Pengelolaan Persampahan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99,60%	99,83%	100,23%	99,60%	82,83%	82,71%
3.	Hasil penilaian mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B (70)	A (80,70)	115,29%	B (70)	A (87,28)	124,68%
	Indikator Kinerja Program																
4.	Persentase Usaha yang Telah Memiliki Izin Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persen	12,03%	11,35%	94,36%	12,03%	12,63%	105,01%	15,28%	14,37%	94,06%	15,58%	15,54%	99,74%	-	-	-
5.	Persentase Usaha yang Telah Memiliki Dokumen Lingkungan	Persen	67,73%	71,99%	106,29%	74,15%	75,64%	102,01%	80,61%	76,18%	94,50%	80,77%	76,84%	95,13%	-	-	-
6.	Persentase Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,00%	25,00%	100%	50%	75%	150%

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota																
7.	Persentase penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,67%	100,00%	149,99%
8.	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	Persen	92,24%	96,12%	104,20%	96,12%	98,06%	102,02%	100%	77,35%	77,35%	37,42%	35,48%	94,83%	-	-	-
	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73,23%	69,35%	94,71%
9.	Persentase Kampung Berwawasan Lingkungan	Persen	52,94%	53,25%	100,59%	52,94%	53,25%	100,59%	100%	56,21%	56,21%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Kampung ProKlim	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,17%	62,13%	105,00%	62,13%	65,09%	104,76%
10.	Persentase Bank sampah yang aktif	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56,92%	72,67%	127,68%	60,00%	79,92%	123,20%

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
11.	Persentase Perusahaan yang Mentaati Dokumen Lingkungan	Persen	42,34%	47,75%	112,77%	45,97%	51,68%	112,42%	46,04%	56,19%	122,05%	-	-	-	-	-	-
	Persentase kepatuhan pelaku usaha melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,00%	29,94%	372,93%	33,17%	32,71%	98,60%
12.	Persentase Layanan Pengujian Parameter Kualitas Air Terakreditasi	Persen	31,11%	31,11%	100,00%	31,11%	37,78%	121,43%	37,78%	53,33%	141,17%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup sesuai SOP	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,30%	73,74%	103,43%	-	-	-
	Persentase Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup Pendukung IKA dan IKU	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,63%	53,51%	101,67%
13.	Persentase kebersihan sungai yang terpelihara	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,50%	75,50%	100,00%
14.	Tingkat Kepuasan Layanan Pengelolaan RTH Publik	Persen	69,70%	69,70%	100,00%	72,31%	76,85%	106,28%	73,81%	78,28%	106,06%	-	-	-	-	-	-
	Persentase RTH Publik yang Dikelola Terhadap Luas RTH Publik	Persen	42,57%	30,31%	71,19%	42,9%	30,41%	70,87%	43,22%	30,40%	70,33%	-	-	-	-	-	-
	Persentase Ruang Terbuka Hijau	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,340%	23,341%	100%	23,3430%	23,351%	100,03%
15.	Capaian pengelolaan RTH dan inventarisasi tutupan lahan	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,664 6%	61,8325 %	100,272 2%
16.	Tingkat kepuasan layanan penanganan sampah	Persen	73,11%	72,26%	98,84%	74,61%	77,94%	104,46%	76,11%	78,33%	102,92%	-	-	-	-	-	-
	Persentase sampah yang tertangani	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,60%	80,54%	95,20%	83,40%	60,42%	72,45%
17.	Persentase Sampah yang Dikelola Secara 3R	Persen	16,00%	24,79%	154,91%	16,00%	20,44%	127,74%	26,00%	21,65%	83,27%	-	-	-	-	-	-

Tabel 2. 4 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024

No	Indikator Sasaran	Satuan	2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase sampah yang berkurang	Persen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,00%	19,29%	128,61%	16,20%	21,96%	135,55%
18.	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Lingkungan Hidup	Nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A	A	100%	A	A	100%

2.1.4 Kelompok Sasaran pelayanan Perangkat Daerah

Kelompok sasaran yang ingin dicapai pada program dan kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 adalah:

1. Dinas/Instansi terkait pengelola lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta memberikan pelayanan kepada Dinas/Instansi terkait pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta seperti pelayanan dokumen lingkungan, pelayanan persetujuan teknis dan SLO, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Pengelolaan sampah dll. Selain itu DLH Kota Yogyakarta menjalin Kerjasama dengan Dinas/ Instansi terkait pelayanan satu pintu yang ada di DPMPSTSP meliputi:

- Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
- Keputusan kelayakan lingkungan hidup
- Persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
- Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
- Izin penebangan pohon dan pemindahan taman
- Persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestik
- Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah

- h. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Pembuangan Emisi
- i. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
- j. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
- k. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan Emisi
- l. Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3
- m. Perubahan Persetujuan Lingkungan

Selain itu DLH Kota Yogyakarta melakukan Kerjasama juga terkait Peningkatan kapasitas dalam pengelolaan lingkungan lokal dan kolaborasi dalam program penghijauan, pengelolaan sampah, dan konservasi.

2. Masyarakat/Pemerhati /Komunitas di Kota Yogyakarta.

Sebagai instansi pelayanan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga melayani masyarakat berupa layanan sebagai berikut :

- a. Pelayanan Pengelolaan Sampah
- b. Retribusi
- c. Ruang Terbuka Hijau
- d. Pertamanan dan Perindang
- e. Program Kampung Iklim
- f. Pembinaan Bank Sampah
- g. Pengujian kualitas lingkungan yang meliputi sampel air dan udara

Selain itu DLH Kota Yogyakarta juga melibatkan dalam program pemberdayaan, pelestarian, kolaborasi dalam kegiatan penanaman pohon, bersih-bersih, dan kampanye lingkungan.

3. Masyarakat di lingkungan sekolah.

Masyarakat di lingkungan sekolah juga merupakan kelompok sasaran pelayanan DLH Kota Yogyakarta. Adapun pelayanan tersebut meliputi pendampingan:

- a. Sekolah berwawasan lingkungan
- b. Sekolah Adiwiyata (sekolah peduli dan berbudaya lingkungan)
- c. Edukasi lingkungan hidup untuk siswa dan guru.
- d. Workshop dan pelatihan lingkungan bagi pelajar.

4. Industri/Usaha/Industri yang berpotensi sumber pencemar.

Layanan DLH Kota Yogyakarta terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi sumber pencemar meliputi :

- a. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk mematuhi regulasi di bidang lingkungan hidup.

- b. Penerapan sistem pengelolaan lingkungan melalui dokumen lingkungan yaitu AMDAL, UKL-UPL, SPPL, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan teknis dan SLO.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sering bekerja sama dengan berbagai mitra dalam menyelenggarakan pelayanannya, termasuk dalam inovasi, dan peningkatan kualitas lingkungan. Mitra DLH dapat meliputi :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Yogyakarta

DPMPTSP menjadi mitra DLH dalam hal pelayanan satu pintu kepada pelaku usaha/ kegiatan, meliputi :

- a. Persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup
- b. Keputusan kelayakan lingkungan hidup
- c. Persetujuan dokumen evaluasi lingkungan hidup
- d. Persetujuan dokumen pengelolaan lingkungan hidup
- e. Izin penebangan pohon dan pemindahan taman
- f. Persetujuan usaha pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga/sampah domestic
- g. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
- h. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi untuk Kegiatan Pembuangan Emisi
- i. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
- j. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan dan/atau Pemanfaatan Air Limbah
- k. Surat Kelayakan Operasional Kegiatan Pembuangan Emisi
- l. Surat Kelayakan Operasional Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3
- m. Perubahan Persetujuan Lingkungan

2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kota Yogyakarta

Dindikpora menjadi mitra DLH dalam melakukan Pembinaan Sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah Adiwiyata di Kota Yogyakarta. Dindikpora memiliki peran penting dalam mendukung dan mengimplementasikan program Adiwiyata di sekolah, beriringan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang menjadi koordinator utama dalam pemberian penghargaan dan fasilitasi program Sekolah berwawasan lingkungan dan Adiwiyata. Peran Dindikpora yaitu melakukan pembinaan terhadap sekolah untuk menjadi Sekolah berwawasan lingkungan/ Adiwiyata di Kota Yogyakarta.

3. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) Kota Yogyakarta

Diskominfo menjadi mitra DLH dalam hal digitalisasi pelayanan dengan aplikasi terpadu Jogja Smart Service (JSS). Didalam JSS pelayanan DLH meliputi :

 - a. Silaling
 - b. Perizinan Sektor Lingkungan (terintegrasi dari DPMPTSP)
 - c. Uji Kualitas Air (e-Labling)
 - d. Bank Sampah
 - e. Informasi Kualitas Lingkungan Hidup

Selain itu, terdapat layanan aduan pada JSS yang terintegrasi jika terdapat aduan lingkungan hidup akan terlapor pada admin aduan JSS DLH Kota Yogyakarta.
4. Forum Bank Sampah (FBS) Kota Yogyakarta

FBS Kota Yogyakarta menjadi mitra DLH dalam hal pengelolaan lingkungan hidup dan komunikasi kepada Masyarakat terkait peduli lingkungan. Dengan adanya forum bank sampah kota Yogyakarta ini diharapkan bank sampah di kota Yogyakarta ini dapat terbina dan aktif sehingga sampah di kota Yogyakarta ini dapat berkurang dan diolah dengan baik. Sehingga Masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekitar dan ekosistem persampahan secara berkelanjutan.
5. Tim Pendataan Wilayah

Tim Pendataan Wilayah merupakan mitra DLH dalam pembinaan, pengawasan dan pelaporan data sampah yang terkelola pada bank sampah yang ada di wilayah. Setiap bulan Tim Pendata melaporkan hasil binaan bank sampah pada aplikasi Bank Sampah yang ada di JSS yang selanjutnya DLH akan merekapitulasi dan melaporkan pada aplikasi SIPSN KLH. Adapun tugas – tugas tersebut meliputi :

 - a. Menyusun laporan kegiatan dan laporan pengelolaan sampah di bank sampah sesuai dengan bank sampah yang menjadi dampingannya setiap bulan serta tergabung dalam kegiatan forum bank sampah kemantren/kelurahan
 - b. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah di bank sampah kepada DLH
 - c. Memberikan rekomendasi kepada DLH berdasarkan hasil pendataan untuk pengembangan bank sampah
6. Bank Sampah Induk (BSI) Kota Yogyakarta

Bank Sampah Induk (BSI) menjadi mitra DLH dalam penyaluran sampah dari bank sampah unit ke offtaker. Keberadaan Bank Sampah Induk Jogja itu untuk mengatasi permasalahan BSU yang kesulitan menemukan mitra/pelapak untuk menyalurkan sampah yang telah terkumpul di BSU.
7. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang menjadi mitra DLH dalam hal pengadaan tanah untuk RTHP, Penetapan rencana tata ruang wilayah (RTRW), Rencana rinci tata ruang (RRTR) Kota dan koordinasi sinkronisasi terkait perencanaan tata ruang Kota.

2.1.6 Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah

Dukungan BUMD seperti Bank BPD DIY, Bank Jogja dan PDAM dalam kegiatan-kegiatan terkait lingkungan hidup di Kota Yogyakarta meliputi partisipasi pada kegiatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN), Hari Lingkungan Hidup, Anugerah Lingkungan, dll

2.1.7 Kerja sama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

Adapun kerja sama daerah yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yaitu meliputi :

1. Kerjasama dengan PT Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Cabang Senopati terkait Penerimaan Pembayaran Retribusi Persampahan Kebersihan Secara Non Tunai Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kenyamanan dalam pemungutan dan penerimaan retribusi oleh DLH Kota Yogyakarta serta menyukseskan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP).
2. Kerjasama dengan PT Solusi Bangun Indonesia terkait Kerja Sama Pemanfaatan Sampah Kota Yogyakarta Sebagai Refuse-Derived Fuel (RDF). Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan penanganan sampah dan menciptakan nilai ekonomi dari RDF yang dihasilkan oleh unit pengolahan sampah yang dikelola Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Kerjasama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemda DIY tentang Sinergi Pengoperasian Dan Perawatan Jaringan Peralatan Dan Stasiun Pemantauan Kualitas Udara Ambien (SPKUA).
4. Kerjasama dengan PT Brahma Putera tentang pemanfaatan RTHP Gajahwong Edupark.
5. Kerjasama dengan Pusat Inovasi Agroteknologi (PIAT) UGM tentang pengolahan sampah daun dan ranting hasil pemangkasan pohon

2.2 Permasalahan

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah.

1.2.1 Permasalahan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Yogyakarta dalam upaya mewujudkan lingkungan di Kota Yogyakarta yang berkualitas, tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang banyak berdampak

pada lingkungan. Dengan demikian perlu diidentifikasi permasalahan lingkungan sebagai berikut:

1. Terbatasnya ketersediaan lahan di wilayah Kota Yogyakarta untuk pengembangan lokasi pengolahan sampah serta belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga dari sumbernya.

Luas Kota Yogyakarta hanya 32,8 hektar dengan penduduk yang cukup padat menjadi kendala dalam pengembangan pengolahan persampahan. Penolakan warga atas keberadaan UPS (Unit Pengelolaan Sampah) yang berada di dekat dengan lingkungan permukiman menjadi kendala dalam pembangunan dan pengembangan lokasi pengolahan sampah. Di sisi lain, pengurangan sampah di Kota Yogyakarta belum dapat berjalan maksimal, karena belum semua masyarakat menerapkan upaya pengelolaan sampah rumah tangga dengan metode 3R (*reduce, reuse, recycle*) meskipun telah dilakukan edukasi yang menyeluruh hingga ke tingkat kelurahan dan RT di setiap wilayah.

2. Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta.

Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta disebabkan oleh pembuangan air limbah domestik, buangan sampah liar, dan limbah peternakan. Permasalahan ini tidak terlepas dari kondisi tata ruang dimana kepadatan masyarakat yang cukup tinggi terkonsentrasi di kawasan bantaran sungai dan menjadi tantangan dalam penanganan sanitasi. Penurunan kualitas air ditandai dengan tingginya parameter Nitrat dan *total coliform* di air tanah dan parameter *fecal coli*, *total coliform* dan *fosfat* yang melebihi baku mutu.

3. Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.

Meningkatnya emisi gas rumah kaca (GRK) adalah fenomena di mana jumlah gas-gas seperti karbon dioksida (CO_2), metana (CH_4), dinitrogen oksida (N_2O), dan gas fluorokarbon (F-gas) yang dilepaskan ke atmosfer mengalami peningkatan signifikan. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh aktivitas sehari-hari seperti pembakaran bahan bakar fosil (batu bara, minyak bumi, dan gas alam), deforestasi, pertanian intensif, serta kegiatan industri dan transportasi berkontribusi pada perubahan cuaca ekstrem dan peningkatan suhu.

4. Belum semua usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) melakukan pelaporan pengelolaan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan yang cukup berdampak pada lingkungan yaitu masih adanya pelaku usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki Rincian Teknis Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3). Di sisi lain, perusahaan/pemrakarsa kegiatan yang telah memiliki izin lingkungan masih kurang tertib dan memahami fungsi, manfaat dan kewajiban perusahaan,

termasuk di dalamnya kewajiban pelaporan pengelolaan lingkungan. Beberapa pelaku usaha dan/atau kegiatan belum melaksanakan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup karena masih terkendala dalam penyediaan data dukung berupa hasil uji laboratorium maupun petugas khusus untuk menangani pengelolaan dan pelaporan lingkungan hidup.

5. Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) di Kota Yogyakarta.

Kota Yogyakarta dengan karakteristiknya yang padat penduduk menyebabkan sebagian besar penggunaan lahannya untuk permukiman dan perdagangan/jasa sehingga perluasan RTH yang merupakan unsur penting dari terciptanya ekologi kota yang nyaman dan sehat cukup terkendala.

Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Yogyakarta yang terdiri dari jumlah % RTHP Publik dan RTH Privat baru mencapai 23% dari target nasional setiap regional dari target yang harus dipenuhi adalah 30%. Dalam data yang sudah disajikan, RTH Publik (RTHP) yang pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta baru mencapai 8% dari luas wilayah, padahal target minimalnya harus mencapai 20% dari luas wilayah Kota Yogyakarta. Dengan segala tantangan yang harus dihadapi dan kepentingan masyarakat yang sering bertolak belakang dengan upaya Pemerintah dalam penyediaan RTHP ini, maka perlu disusun strategi agar RTHP dapat ditingkatkan baik secara kualitas maupun kapasitasnya.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, karena dampaknya akan signifikan bagi kondisi lingkungan hidup daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Identifikasi isu strategis pembangunan menjadi salah satu substansi perencanaan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penentuan isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dilakukan dengan mereviu kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari gambaran pelayanan perangkat daerah, identifikasi permasalahan bidang lingkungan hidup, visi misi dan arah kebijakan kepala daerah terpilih, telaah RTRW Kota Yogyakarta, serta dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, dan regional di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan uraian di atas dapat diperinci isu-isu strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta 5 (lima) tahun ke depan sebagaimana dalam table berikut ini :

Tabel 2. 5 Teknis menyimpulkan isu strategis perangkat daerah

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Lahan milik Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana prasarana pengelolaan sampah, serta pengadaan teknologi dalam pengolahan sampah.	Keterbatasan lahan di wilayah Kota Yogyakarta untuk pengembangan pembangunan lokasi pengolahan sampah dan belum optimalnya pemilahan dan pengolahan sampah rumah tangga dari sumbernya.	Pengelolaan Persampahan yang belum optimal	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan.	Implementasi Pengelolaan Satuan Ruang Strategis (SRS) di Kota Yogyakarta	Tantangan penyediaan lahan dan penyusunan strategi pengelolaan sampah serta edukasi yang sesuai dengan karakteristik Kota Yogyakarta.
Sungai di Kota Yogyakarta dapat menjadi lokasi yang indah dan sehat bahkan dikembangkan menjadi objek wisata meskipun dekat dengan permukiman warga.	Penurunan kualitas air dan pencemaran air sungai di Kota Yogyakarta.	1. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah 2. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	Komitmen Mewujudkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan New Urban Agenda (NUA)	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY	1. Tantangan dalam optimalisasi kegiatan pembersihan sampah di sungai. 2. Peningkatan pengendalian sumber pencemar pada air sungai yang disebabkan oleh air limbah.
Kota Yogyakarta menjadi salah satu destinasi wisata favorit karena udaranya masih cukup bersih.	Meningkatnya emisi gas rumah kaca di Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.	1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal 2. Belum optimalnya transportasi public 3. Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik 4. Kawasan dan permukiman kumuh belum seluruhnya teratasi	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	1. Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan 2. Penguatan Daya Saing Pariwisata Budaya dalam Konteks Pariwisata Nasional	1. Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY 2. Penetapan Kawasan Sumbu Filosofi sebagai Warisan Dunia dan Implikasinya	Tantangan peningkatan inventarisasi sumber emisi gas rumah kaca lingkup Kota Yogyakarta yang menyebabkan perubahan iklim.
Berkembang pesatnya usaha dan/atau kegiatan di Kota Yogyakarta sehingga diperlukan pemantauan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang	Belum semua usaha dan/atau kegiatan (perusahaan) melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan hidup.	Penurunan Kualitas dan Kuantitas Air Tanah	1. Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota 2. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi Global	Tantangan transisi ke kota rendah emisi dan berketahanan lingkungan	Dinamika perkembangan wilayah perkotaan regional DIY	- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan mengenai pengelolaan lingkungan hidup pada usaha dan/atau kegiatan. - Menerapkan mekanisme teguran dan sanksi bagi usaha

Potensi Daerah yang menjadi kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
berada di wilayah Kota Yogyakarta dan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah						dan/atau kegiatan yang melanggar dan menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup. - perlunya sistem database dan monitoring pelaporan lingkungan yang komprehensif
Lahan milik pemerintah Kota Yogyakarta yang perlu dimaksimalkan untuk peningkatan luasan RTH Publik	Terbatasnya Ruang Terbuka Hijau di Kota Yogyakarta	Kurangnya Ruang Terbuka Hijau Publik	Perubahan Iklim dan Ketahanan Kota.	Tantangan Transisi ke Kota Rendah Emisi dan Berketahanan Lingkungan	Dinamika Perkembangan Wilayah Perkotaan Regional DIY	Tantangan dalam penambahh luasan RTH dan meningkatkan tutupan vegetasi dengan adanya Ruang Terbuka Hijau Publik dan Taman Perindang Jalan yang dikelola dengan baik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Visi dan Misi RPJMD 2025-2029

Dalam penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta berdasarkan pada visi dan misi RPJMD 2025-2029 yaitu **“Membangun Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”**. Visi tersebut diwujudkan dengan misi:

1. Mewujudkan pembangunan manusia yang produktif, berkualitas dan berkepribadian melalui peningkatan kualitas Pendidikan dan akses Kesehatan
2. Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari
3. Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dan Keadilan Sosial melalui pembangunan yang inklusif, kreatif, dan berbudaya, berbasis potensi sumber daya lokal
4. Mewujudkan tata pemerintahan daerah dan tatanan sosial yang bebas dari korupsi dan berkeadaban, dengan setia pada Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), Pancasila dan UUD 1945
5. Memperkokoh perjuangan mencapai tujuan Keistimewaan DIY.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah bidang Lingkungan mendukung misi ke-2 (dua), yaitu **“Mewujudkan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan lingkungan hidup yang lestari.”**

3.2 Tujuan dan Sasaran

Pelaksanaan misi dalam RPJMD tersebut dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Daerah. Adapun Tujuan Daerah Kota Yogyakarta adalah:

1. Terwujudnya Manusia Kota Yogyakarta yang berkualitas unggul dan berkepribadian
2. Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang merata dan berkeadilan
4. Terwujudnya tata pemerintahan yang bebas dari korupsi, berkeadaban dan selaras dengan tujuan keistimewaan DIY.

Dinas Lingkungan Hidup mendukung tujuan ke-2 (dua), yaitu **“Terwujudnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana”**.

Tujuan Daerah Kota Yogyakarta di atas kemudian dijabarkan ke dalam Sasaran Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat
2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
3. Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana
4. Meningkatnya perekonomian berbasis potensi sumber daya lokal
5. Meningkatnya keberdayaan Masyarakat
6. Menurunnya kemiskinan masyarakat
7. Meningkatnya kapasitas tatakelola pemerintahan
8. Meningkatnya kondusivitas daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta mendukung Sasaran ke-3 (tiga) yaitu **“Meningkatnya infrastruktur perkotaan yang berkualitas, lingkungan hidup yang lestari serta berketahanan iklim dan bencana”**.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, penentuan Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 didasarkan pada:

- Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya, dan
- Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029

Perumusan Tujuan dalam Renstra Perangkat Daerah merupakan tahapan yang sangat penting dalam perencanaan lima tahun ke depan. Tujuan merupakan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Sementara itu sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah Kota Yogyakarta yang didukung oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang telah dijabarkan sebelumnya, dengan demikian dapat dirumuskan tujuan Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2025-2029 yaitu **“Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari”** dengan indikator “Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup” yang diformulasikan dengan komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan.

Penetapan sasaran dirumuskan sesuai dengan urusan yang diampu perangkat daerah. Dinas Lingkungan Hidup mengampu urusan lingkungan hidup, dan dengan acuan tujuan yang telah ditetapkan sehingga sasaran Renstra DLH Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas
- 2. Meningkatnya Pengelolaan Persampahan
- 3. Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup

Berikut adalah matriks teknik perumusan tujuan dan sasaran Dinas Lingkungan Hidup beserta indikator kinerjanya dalam Renstra 2025-2029:

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup											
- Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari		Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	73.33	76.67	77.32	77.97	77.62	79.27	80.09	
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup (Persentase)	62.60	67.71	68.31	68.91	69.52	70.12	71.06	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Capain Pengelolaan Persampahan (Persentase)	84.06	85.62	86.32	87.02	87.72	88.42	89.12	
		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	A	A	A	A	A	

3.3 Strategi dan Penahapan Renstra

Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dalam mencapai tujuan dituangkan sebagai berikut:

- 1. Perencanaan lingkungan hidup sesuai dengan KLHS RPJPD dan KLHS RPJMD.
- 2. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- 3. Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).
- 4. Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- 5. Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati).
- 6. Peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat.
- 7. Pengelolaan persampahan.

Penyusunan penahapan Renstra dilakukan agar pelaksanaan Renstra dapat berjalan secara terarah dan terukur dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan dimaksudkan sebagai pengelompokan atau pengurutan pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan ke dalam tahapan tahunan yang disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan, ketersediaan sumber daya, serta dinamika lingkungan strategis yang mengacu pula pada target indikator yang ingin dicapai. Strategi penahapan Renstra DLH tertuang dalam matriks berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2030

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
1	2	3	4	5
Penguatan dasar dan kapasitas pembangunan	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik	Akselerasi Pembangunan Prioritas	Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan	Penyelesaian dan Konsolidasi Kesenambungan Pembangunan

Penjelasan terkait penekanan pembangunan pada setiap tahapan dijabarkan sebagai berikut:

- 1. Penguatan dasar dan kapasitas pembangunan
Tahap pertama dalam Renstra DLH Kota Yogyakarta 2025-2029 fokus pada penyiapan dasar atau fondasi pembangunan, termasuk kerangka kebijakan serta penguatan kapasitas sumber daya pembangunan, mencakup SDM, infrastruktur, teknologi, pendanaan, maupun kelembagaan. Pada tahapan ini juga akan dilakukan evaluasi pengendalian pencemaran air dan udara sejalan dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tahun 2025-2055. Dalam hal pengelolaan sampah, pada tahapan ini akan dilakukan peningkatan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dimulai dari perhotelan. Selain itu juga dilakukan pemantapan infrastruktur melalui transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan di 2 Depo dan Unit Pengelola Sampah (UPS), serta penguatan pemasangan *trash barrier* di sungai sebagai upaya pengendalian pencemaran air. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi terkait titik lokasi pemantauan air dan udara.
- 2. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Publik
Pada tahap kedua ini, merupakan tahapan lanjutan dari tahapan pertama, dengan dasar-dasar pembangunan yang sudah kuat, kemudian akan dilakukan perluasan akses dan peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat terkait kemudahan dalam mengakses layanan di bidang

lingkungan, seperti Uji Laboratorium, SILALING, perizinan, pembuatan dokumen UKL-UPL dan SPPL, serta pengembangan digitalisasi RTHP dengan pembuatan aplikasi basic dan penyajian data existing RTHP dan taman. Selain itu juga akan dilakukan upaya transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber.

3. Akselerasi Pembangunan Prioritas

Pada tahap ini, dilakukan percepatan pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan hingga akhir tahun perencanaan. Dalam rangka meningkatkan luasan % Ruang Terbuka Hijau Publik akan dilakukan penanaman pohon perindang pada jalur hijau dan berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk pengembangan RTHP baik secara kapasitas maupun kualitasnya. Dalam pengelolaan persampahan akan dilakukan penguatan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen rumah makan, restaurant, cafe, dan jasa boga. Selain itu juga akan dilakukan peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah yang terolah sebesar 66,31%. Dilakukan pula peningkatan layanan pengumpulan sampah dengan cakupan rumah tangga terlayani sebesar 86.47% dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah

4. Pembangunan Terintegrasi dan Berkelanjutan

Tahap keempat fokus pada pencapaian pembangunan terintegrasi, merupakan hasil yang telah dibangun pada tahap pertama, peningkatan akses terhadap layanan publik yang berkualitas pada tahap kedua, serta akselerasi pelaksanaan program-program pembangunan untuk memastikan pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahap ketiga. Pada tahap ini dilakukan evaluasi data inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sektor energi, proses produksi, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan) dan pengelolaan limbah secara berkala setiap tahun. Dilakukan pula update tutupan vegetasi Kota Yogyakarta dan peningkatan luas RTH dengan deliniasi melalui citra satelit secara berkelanjutan setiap tahunnya dan refocusing fungsi RTHP dan taman terkait rencana penambahan dan pengembangannya. Pada pengelolaan persampahan dilakukan monitoring dan evaluasi sistem retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan secara digital, meningkatkan layanan pengumpulan sampah dengan cakupan rumah tangga terlayani sebesar 87.98% dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah, Meningkatkan dan transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan di 2 Depo, dan Peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah

yang terolah sebesar 72,92%. Pada tahap keempat ini juga dilakukan peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota.

5. Penyelesaian dan Konsolidasi Kestinambungan Pembangunan

Tahap kelima berfokus pada penyelesaian seluruh program pembangunan, memastikan target pembangunan tercapai sebagai indikator keberhasilan terwujudnya tujuan DLH yaitu “Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari”. Pada tahap ini dilakukan penyelesaian pengurangan sampah sesuai target oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen Bidang Manufaktur dan dilakukan pula peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan persentase sampah yang terolah dengan target akhir tahun sebesar 74,34%.

Lokus Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025–2029 meliputi seluruh wilayah Kota Yogyakarta untuk mendorong tercapainya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari.

3.4 Arah Kebijakan

Pada bab sebelumnya telah dirumuskan Sasaran yang akan dicapai dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas; Meningkatnya Pengelolaan Persampahan, dan meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup. Dalam upaya pencapaian sasaran tersebut, kemudian dirumuskan strategi dalam mencapai tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Matriks Arah Kebijakan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
	<u>Tujuan</u>			
	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas			
	<u>Sasaran</u>			
1.	Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Meningkatkan kesesuaian perencanaan pembangunan dan perencanaan lingkungan	1) Melaksanakan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 2) Melaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 3) Melaksanakan Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota 4) Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi KLHS 5) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup	1) Melaksanakan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota 2) Melaksanakan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota 3) Melaksanakan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			4) Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) 5) Melaksanakan penyusunan dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut 6) Melaksanakan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 7) Melaksanakan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 8) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Proklamasi 9) Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi RW/kampung Proklamasi 10) Memfasilitasi pembentukan RW/kampung Proklamasi di wilayah 11) Memfasilitasi pengusulan RW/kampung Proklamasi ke tingkat Provinsi dan Nasional 12) Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 13) Melakukan pendampingan dan bimbingan penyusunan berkas administrasi Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 14) Memfasilitasi pembentukan Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata 15) Memfasilitasi pengusulan Sekolah Adiwiyata ke tingkat Provinsi, Nasional dan Mandiri	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas ruang terbuka hijau	1) Inventarisasi RTH di Kota Yogyakarta secara berkala, khususnya RTH Publik dan tutupan vegetasi. 2) Melaksanakan pembangunan RTHP dan penanaman pohon perindang pada jalur hijau untuk meningkatkan persentase RTHP. 3) Melaksanakan penyempurnaan atau penambahan fasilitas RTHP dan renovasi taman jalur hijau untuk meningkatkan kualitas RTHP. 4) Melaksanakan kolaborasi yang baik dengan OPD terkait dalam pemanfaatan lahan-lahan kosong milik Pemerintah untuk pengembangan RTHP. 5) Sosialisasi pengelolaan RTH baik publik maupun privat kepada warga dan pemangku wilayah setempat. 6) Penyusunan peraturan/regulasi terkait tatacara pemberian izin penanaman pohon dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagai upaya untuk mempertahankan	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
			luasan tutupan vegetasi. 7) Kerjasama dalam pengolahan sampah daun dan ranting hasil pemangkasan pohon. 8) Kerjasama dalam pemanfaatan RTHP 9) Menerapkan sistem asuransi untuk penjaminan korban terdampak kejadian pohon tumbang. 10) Menerapkan sistem informasi di RTHP yang terintegrasi JSS sebagai aplikasi penunjang pelaporan dan informasi kondisi RTHP. 11) Himbauan kepada akomodasi pariwisata seperti hotel, restoran, dsb untuk menambah dan mempertahankan RTH Privat.	
2.	Meningkatnya Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan kualitas dan kapasitas penanganan sampah	1) Meningkatkan layanan pengumpulan dan pengangkutan serta menyalurkan sampah ke fasilitas pengolahan sampah 2) Peningkatan pengelolaan sampah melalui penguatan regulasi, penegakan hukum, optimalisasi kelembagaan dan pendanaan.	
		Mempercepat pengurangan sampah berbasis masyarakat dan 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>)	1) Melakukan Upaya Transformasi perilaku seluruh elemen masyarakat melalui komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) penyuluhan dan pendampingan intensif kepada masyarakat terkait pemilahan dan pengelolaan sampah di sumber 2) Meningkatkan dan optimalisasi fasilitas (untuk mengelola sampah dengan prinsip 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) sebagai sarana edukasi perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah dan pelaksanaan ekonomi sirkular. 3) Penguatan operasional bank sampah unit di setiap kelurahan. 4) Penguatan dan mengoptimalkan bank sampah induk.	
		Meningkatkan kualitas dan kapasitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah	1) Meningkatkan dan transformasi fasilitas pengumpulan sampah (TPS/Depo) sebagai tempat pemilahan lanjutan. 2) Penguatan operasional TPS/Depo sebagai tempat pengumpulan dan pemilahan lanjutan. 3) Peningkatan pengolahan sampah di Unit Pengolahan Sampah (UPS) yang dikelola oleh pemerintah daerah.	
		Meningkatkan peran dan tanggung jawab produsen dalam pengelolaan sampah (<i>extended producer</i>)	1) Melaksanakan kajian peta jalan pengurangan sampah oleh produsen 2) Meningkatkan pengurangan sampah oleh produsen sesuai Permen LHK P.75/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen yang dimulai dari sektor hotel, restoran, kafe, dan produsen manufaktur.	

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Keterangan
		<i>responsibility)</i>		
		Kerja sama pengelolaan sampah dengan pembiayaan kreatif (<i>creative financing</i>)	1) Pembaharuan data wajib retribusi, dan penataan/perbaikan SOP tata cara pemungutan retribusi kebersihan/per-sampahan. 2) Penguatan kapasitas dan keahlian petugas pemungut retribusi. 3) Peningkatan dan peralihan pembayaran retribusi secara non tunai. 4) Peningkatan sistem retribusi kebersihan dan pelayanan persampahan secara digital.	
3.	Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas SAKIP perangkat daerah	1) Penguatan proses perencanaan dengan meningkatkan kolaborasi dengan Bidang satu Dinas untuk mencermati bersama indikator dan target kinerja. 2) Meningkatkan evaluasi terkait Pengukuran Kinerja berjenjang setiap level Program, Kegiatan, dan Subkegiatan yang dilaksanakan tiap Triwulan. 3) Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam verifikasi penyusunan Pelaporan Kinerja.	
		Meningkatkan nilai zona integritas perangkat daerah	1) Memetakan risiko dari level Program hingga ke level Subkegiatan dengan kolaborasi antar bidang dan penanganannya dengan rapat, <i>brainstorming</i> , dan diskusi kecil. 2) Mengikutsertakan pegawai untuk mengikuti Diklat/Bimtek MR dan <i>sharing knowledge</i> ataupun Bimtek internal dari pegawai yang telah mengikuti bimtek. 3) Arahan dari pembina apel di setiap apel hari Senin supaya meningkatkan integritas dan kinerja. 4) Melaksanakan pengajian rutin dalam rangka pembekalan spiritual bagi pegawai beragama Islam supaya terhindar dari perilaku korupsi, gratifikasi, nepotisme, dan lain-lain.	
		Meningkatkan kualitas SPIP perangkat daerah	1) Melaksanakan penguatan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terkait SPIP 2) Penerapan manajemen risiko dan mengintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan 3) Mengintegrasikan implementasi SPIP dengan program Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM 4) Penyusunan Proses bisnis DLH 5) Melaksanakan koordinasi dengan bidang terkait seluruh bukti dukung SPIP 6) Melaksanakan sosialisasi antikorupsi di internal DLH 7) Melaksanakan evaluasi dan pembaharuan dokumen pendukung SPIP 8) Melaksanakan monitoring dan evaluasi berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dari Inspektorat atau auditor eksternal	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program

Dari visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya akan diwujudkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selama kurun waktu 2025-2029, yang nantinya akan terdiri dari 1 (satu) program rutin administrasi perkantoran dan 7 (tujuh) program teknis.

Perencanaan program dan kegiatan dilakukan dengan berpedoman pada program pembangunan daerah dalam RPJMD 2025-2029 menurut urusan pemerintahan sebagai berikut :

Program rutin administrasi perkantoran terdiri dari Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota merupakan program kesekretariatan yang ada pada DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup, serta memiliki Indikator Kinerja meliputi Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup, Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup, dan Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup.

Sementara itu untuk Program teknis di DLH Kota Yogyakarta terdiri dari:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Program Perencanaan Lingkungan Hidup merupakan program yang mengampu terkait perencanaan lingkungan hidup meliputi RPPLH dan KLHS. Program ini memiliki Sasaran Program yaitu Meningkatnya perencanaan lingkungan hidup dan Indikator kinerjanya adalah Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup.

2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan program yang mengampu terkait pengendalian lingkungan hidup di DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kinerja yaitu Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara. Sedangkan, untuk Indikator kinerjanya meliputi Persentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup dan Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.

3. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) merupakan program yang mengampu terkait pengendalian B3 dan LB3 di DLH Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan indikator kinerjanya adalah Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) merupakan program yang mengampu Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin PPLH terhadap pelaku usaha/ kegiatan. Program ini memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi. Sedangkan untuk indikator kinerjanya meliputi Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup dan Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan.

5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) merupakan program yang mengampu Pengelolaan RTHP dan taman perindang di Kota Yogyakarta. Program ini memiliki sasaran program yaitu meningkatnya pengelolaan RTH dan indikator kinerjanya adalah Persentase Ruang Terbuka Hijau.

6. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat merupakan program yang mengampu terkait pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup kepada masyarakat, sekolah, dan wilayah. Program ini memiliki sasaran program yaitu Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki 3 indikator kinerja meliputi Persentase Kampung Proklim, Persentase sekolah berwawasan lingkungan dan sekolah adiwiyata serta Persentase bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)

7. Program Pengelolaan Persampahan

Program Pengelolaan Persampahan merupakan program yang mengampu pengelolaan sampah yang ada di Kota Yogyakarta. Program ini

memiliki 2 sasaran program dan 2 indikator kinerja yaitu Meningkatnya pengurangan sampah dan Meningkatnya penanganan sampah. Sedangkan indikator kinerjanya yaitu Persentase sampah yang berkurang dan Persentase sampah yang tertangani

4.2 Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan yang berpedoman pada RPJMD 2025-2029. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

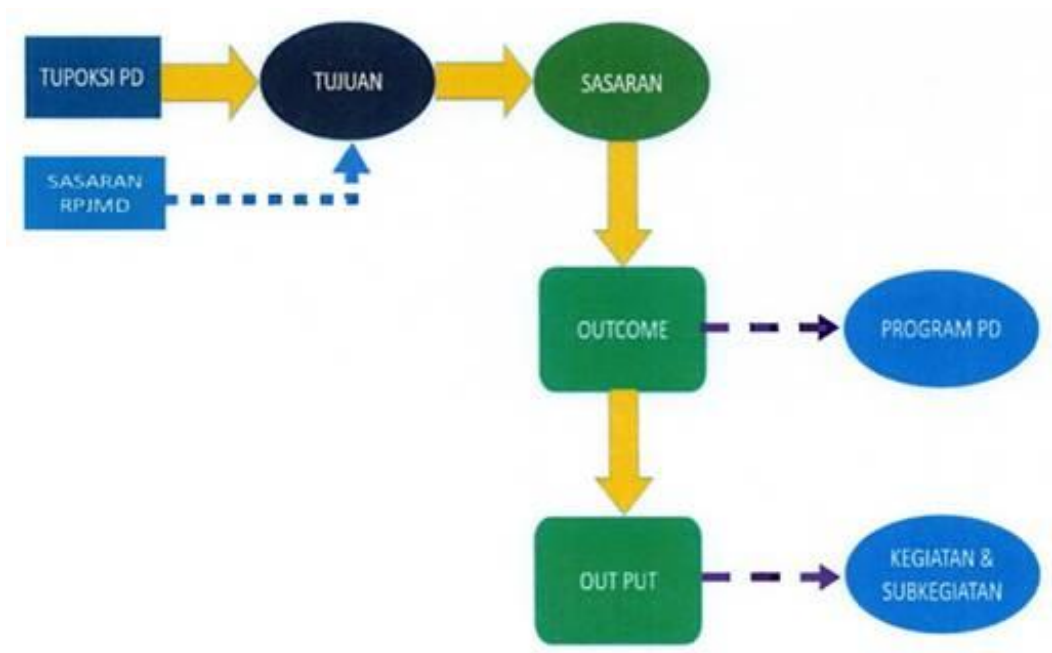
- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup ada 2 cakupan kegiatan yaitu :
 1. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota yang mempunyai sasaran kegiatan yaitu Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dengan indikator kinerja Persentase penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota, kemudian sasaran kegiatan yang kedua adalah Penilaian dokumen perencanaan lingkungan hidup (RPPLH) yang telah disusun, dilakukan pemantauan dan evaluasi, dan dilakukan pengendalian.
 2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota memiliki mempunyai sasaran kegiatan Meningkatnya pemantauan KLHS dengan indikator kinerja Rerata penilaian pemantauan KLHS
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup ada 2 kegiatan :
 1. Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota mempunyai 2 sasaran kegiatan Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup dengan indikator kinerja Persentase pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup dan Terpeliharanya kebersihan Sungai dengan indikator kinerja Persentase kebersihan sungai yang terpelihara.
 3. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan 2 sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca dengan indikator kinerja Persentase inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca, dan Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah sampel pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar dan ketentuan yang berlaku.

- c. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) mempunyai 1 kegiatan yaitu:
1. Penyimpanan sementara Limbah B3 dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 dengan indikator kinerjanya Jumlah dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3
- d. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) mempunyai 1 kegiatan yaitu :
1. Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mempunyai 2 sasaran kegiatan yaitu Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan sasaran kegiatan berikutnya adalah Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan.
- e. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai 1 kegiatan:
1. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan mempunyai 2 sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya luas tutupan vegetasi dengan indikator kinerja Luasan tutupan vegetasi dan sasaran kegiatan Optimalisasi pengelolaan RTH dengan indikator kinerja Persentase RTHP yang dikelola dibanding RTHP kewenangan DLH.
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat mempunyai kegiatan yaitu :
1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran kegiatan Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota dan indikator kinerja Jumlah Lembaga/keompok Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH.

- g. Program Pengelolaan Persampahan memiliki kegiatan
 - 1. Pengelolaan Sampah dengan sasaran kegiatan Meningkatnya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang dengan indikator kinerja Tonase pengurangan sampah dan sasaran kegiatan Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah dengan indikator kinerja Tonase penanganan sampah
- h. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota mempunyai kegiatan :
 - 1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mempunyai sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dengan indikator kinerja Persentase ketepatan penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas Lingkungan Hidup dan Persentase ketersediaan data statistik sektoral Dinas Lingkungan Hidup.
 - 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset dengan indikator kinerja Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup
 - 3. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset dengan indikator kegiatan Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup
 - 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dengan indikator kinerja Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup
 - 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah memiliki sasaran kegiatan Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa dengan indikator kinerja Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta merupakan Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta juga merupakan proses strategis yang harus terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta dijelaskan pada gambar dibawah ini:



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup							
- Meningkatnya Infrastruktur Perkotaan yang Berkualitas, Lingkungan Hidup yang Lestari serta Berketahanan Iklim dan Bencana	Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari				Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas			Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup		
		Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup			Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup	2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tersusunnya dan ditetapkan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
				Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota		
					Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
				Meningkatnya pemantauan KLHS	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
					Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
					Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
			Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara		Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup		Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup	2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
				Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
				Terpeliharanya kebersihan sungai	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
					luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Meningkatnya pengelolaan RTH		Presentase Ruang Terbuka Hijau	2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
				Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
					Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	
				Optimalisasi pengelolaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)		Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
				Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
					Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup		Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi		Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Daerah Kabupaten/Kota			
					Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup		Persentase Kampung ProKlim	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler)	2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas /kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/ kelompok masyarakat	
		Meningkatnya Pengelolaan Persampahan			Capain Pengelolaan Persampahan		
			Meningkatnya penanganan sampah		Persentase sampah yang tertangani	2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
					Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana <u>penanganan sampah</u>	
					Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
					jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/ko ta atau TPA/TPST Regional	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
		Meningkatnya reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup			Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup		
			Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/S emesteran SKPD	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Keuangan Akhir Tahun SKPD		
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
					Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
						2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup		2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset		2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD

4.3 Sub Kegiatan

A. Program Perencanaan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan persiapan berbagai dokumen sebagai bahan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang dilakukan oleh Rapat Paripurna DPRD. Target sub kegiatan ini pada tahun 2025 adalah menyampaikan dokumen perencanaan meliputi Draf Raperda RPPLH dan Naskah Akademik ke Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta untuk diproses lebih lanjut. Sebelum disampaikan untuk proses lebih lanjut, dilakukan proses verifikasi dokumen RPPLH kepada Kementerian Lingkungan Hidup. Indikator kinerja sub kegiatan ini yaitu Jumlah dokumen RPPLH kabupaten/kota yang telah disiapkan dan disampaikan sejumlah 1 bendel dokumen yang terdiri dari Draf Raperda RPPLH dan Naskah Akademik.

2. Sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kota Yogyakarta yang akan ditetapkan pada tahun 2026. Kegiatan ini akan dimulai pada tahun 2026 apabila penetapan Draf Raperda RPPLH telah dilaksanakan pada awal tahun 2026. Indikator kinerja sub kegiatan Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota sejumlah 1 dokumen dimulai tahun 2026. Sub kegiatan Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui capaian pelaksanaan RPPLH dengan membandingkan antara hasil pelaksanaan RPPLH dan nilai indikator kinerja utama RPPLH. Pelaksanaan evaluasi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar perubahan materi RPPLH. Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali dengan target sejumlah 1 dokumen dan dilaksanakan tahun 2030.

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi KLHS

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan pemantauan dan evaluasi KLHS mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Hasil pemantauan dan evaluasi menjadi dasar penyempurnaan perangkat pengaturan mengenai KLHS serta penetapan

Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terkait yang dipandang perlu. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi KLHS ini disampaikan secara berkala setiap akhir tahun oleh Wali Kota kepada Gubernur dengan tembusan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Indikator kinerja sub kegiatan adalah jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun dengan target 1 dokumen dimulai Tahun 2025 - 2030.

B. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) terdiri dari kegiatan:

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan. Fasilitasi berupa rapat koordinasi terkait dokumen lingkungan, verifikasi lapangan dokumen lingkungan, penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan oleh tim teknis dan tim penilai.

Indikator kinerja sub kegiatan ini Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan. Target 128 dokumen (2025), 117 dokumen (2026), 117 dokumen (2027), 117 dokumen (2028), dan 117 dokumen (2029). Penurunan target pada tahun 2025 ke tahun 2026 karena Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 menjadi sub kegiatan tersendiri sehingga tidak menjadi target sub kegiatan ini lagi pada tahun 2026-2029.

2. Sub kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan kegiatan pembinaan dan pengawasan lingkungan terhadap usaha dan atau kegiatan, dan melaksanakan mekanisme teguran dan sanksi bagi usaha dan/atau kegiatan yang melanggar dan menimbulkan dampak pencemaran terhadap lingkungan hidup

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi.

C. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup terdiri dari 2 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota terdiri dari 2 sub kegiatan meliputi:

1. Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kajian Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca. mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, Inventarisasi Emisi GRK dilaksanakan dengan cara pemantauan, pengumpulan dan penghitungan. Kategori kunci untuk menghitung Emisi GRK Kota Yogyakarta meliputi pendataan penggunaan energi, proses produksi, AFOLU (pertanian, kehutanan, dan penggunaan lahan) dan pengelolaan limbah. Kajian Inventarisasi Gas Rumah Kaca dilaksanakan bekerjasama dengan pihak ketiga.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK dengan target 1 Dokumen dimulai dari tahun 2025-2030.

2. Sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan :

- Pemantauan kualitas air
- Pemantauan kualitas udara
- Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut dengan target 3 Dokumen.

- b. Kegiatan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

1. Sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kajian Daya Tampung dan Alokasi Beban Pencemaran Sungai dengan bekerjasama dengan pihak ketiga, Sosialisasi pengelolaan lingkungan, dan Survey sumber pencemar.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota dengan target 5 kegiatan pada tahun 2025 dan 3 kegiatan dimulai dari tahun 2026-2030.

2. Sub kegiatan Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota.

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Kegiatan pembersihan sungai secara rutin oleh tenaga kebersihan sungai, Gerakan Bersih Sungai dengan melibatkan masyarakat sekitar bantaran sungai, Sosialisasi kegiatan pembersihan sungai, dan Belanja jasa tenaga kebersihan sungai.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan target 320.400 m² pada tahun 2025-2030.

D. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) terdiri 1 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Penyimpanan sementara Limbah B3

1. Sub kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk diintegrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).

Pada sub kegiatan ini dilaksanakan Survey verifikasi pengelolaan Limbah B3 kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan, Pengangkutan dan pengolahan sampah yang mengandung B3 bekerjasama dengan pihak ketiga, dan Pemantauan dropbox sampah spesifik mengandung B3.

Indikator kinerja sub kegiatan ini adalah Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dengan target 10 Dokumen dimulai pada tahun 2026-2030.

E. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) mempunyai 1 kegiatan, yaitu :

a. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota

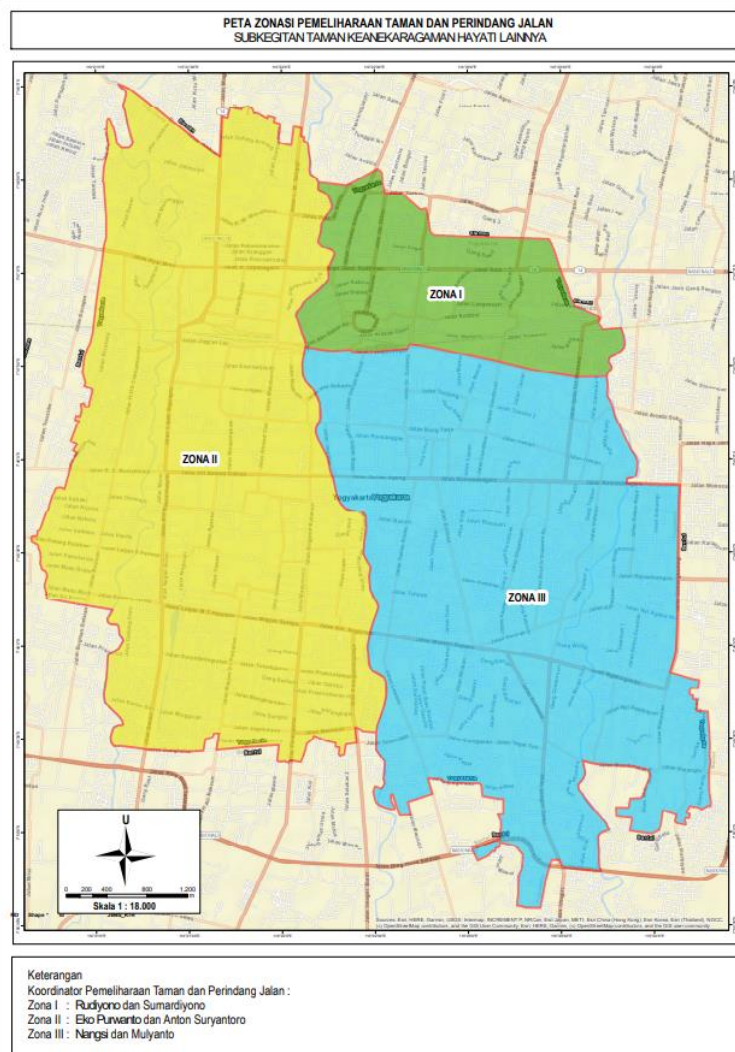
1. Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah perencanaan RTH Publik kawasan permukiman, pembangunan, pemeliharaan rutin, dan rehab maupun renovasi pada RTHP untuk meningkatkan kualitas pelayanannya. Selain itu, dalam sub kegiatan ini dilakukan inventarisasi tutupan vegetasi secara berkala sebagai bahan dasar perhitungan Indeks Kualitas Lahan yang mendukung ketercapaian IKLH yang menjadi sasaran pemerintah daerah.

2. Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

Pada Sub Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya dilakukan pengelolaan keanekaragaman hayati lainnya berupa taman kota dan perindang yang terletak di jalur hijau. Pengelolaan tersebut meliputi aktivitas pemangkasan tanaman, penyiraman, penyulaman, penyiangan, pemupukan, penggantian pohon yang mati/membahayakan, dan mitigasi kejadian pohon tumbang.

Indikator kinerja Sub Kegiatan ini adalah unit taman keanekaragaman hayati lainnya yang dikelola dengan target 3 (tiga) unit. Tiga unit taman keanekaragaman hayati lainnya tersebut merupakan taman kota dan perindang jalur hijau yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) zona berdasarkan area pengawasan dan pemeliharaan. Zonasi taman dan perindang dijelaskan pada gambar di bawah ini :



Gambar 4 2 Peta Zonasi Pemeliharaan Taman dan Perindang

F. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat terdiri dari 1 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/ Kelompok Masyarakat/ Komunitas/Kelompok Masyarakat

Fokus pada sub kegiatan adalah pada peningkatan pemahaman individu atau kelompok dalam isu-isu lingkungan hidup, melalui kegiatan edukasi, pemberdayaan dan partisipasi.

Indikator sub kegiatan ini yaitu jumlah lembaga yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan target sejumlah 15 lembaga setiap tahunnya.

G. Program Pengelolaan Persampahan terdiri dari 1 kegiatan yang meliputi:

a. Kegiatan Pengelolaan Sampah

1. Sub Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan

Fokus pada sub kegiatan terfokuskan pada penyediaan alat kerja pemungutan retribusi kebersihan pelayanan persampahan, operasional pemungutan dan penyetoran retribusi kebersihan pelayanan persampahan, sosialisasi terkait pelayanan persampahan dan retribusi kebersihan pelayanan persampahan, dan monitoring/pengawasan dan evaluasi kegiatan penarikan retribusi kebersihan pelayanan persampahan.

Indikator subkegiatan ini dari tahun 2025 - 2030 yaitu jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat sebesar 45 Kelompok. Kegiatan operasional pemungutan retribusi, sosialisasi terkait retribusi dan monitoring/pengawasan serta evaluasi pemungutan retribusi dilakukan di 45 Kelurahan.

2. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Fokus pada sub kegiatan ini terfokuskan pada penyusunan laporan kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah di 2 (dua) semester tiap tahunnya. Serta pendampingan terkait retribusi kebersihan pelayanan persampahan.

Indikator subkegiatan ini yaitu jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan 1 dokumen Rencana, Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sampah Kota Yogyakarta dari tahun 2025 - 2030.

3. Sub Kegiatan Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota

Fokus pada sub kegiatan ini yaitu terfokuskan pada sosialisasi pengelolaan sampah kepada pelaku usaha, transporter/penggerobak, serta dilakukan pemantauan aktivitas lapangan untuk memonitoring/pengawasan dan evaluasi kinerja penggerobak.

Indikator subkegiatan ini dari tahun 2025 - 2030 yaitu Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota sebanyak 1 dokumen laporan. Sasaran sosialisasi kepada pelaku usaha sebanyak 70 orang, sosialisasi kepada transporter/penggerobak sebanyak 1000 orang.

4. Sub Kegiatan Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah

Fokus pada sub kegiatan ini yaitu terfokuskan pada sosialisasi kepada pelapak/pengepul/pengerosok dan juga dilakukan monitoring/pengawasan serta evaluasi kinerja pelapak dalam melakukan daur ulang sampah.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sampah yang terdaur ulang 20.947,35 ton/tahun di tahun 2025. Sosialisasi kepada pelapak/pengepul/ pengerosok dan monitoring/pengawasan serta evaluasi kinerja pelapak dilakukan kepada 101 pelapak/pengepul/pengerosok. Pada tahun 2026 subkegiatan ini dihapuskan, karena muatan uraian kegiatan tersebut akan digabungkan dengan subkegiatan pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan rencana, kebijakan dan teknis pengelolaan sampah kabupaten/kota.

5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi koordinasi penyediaan sarana prasarana maupun tenaga kerja yang mendukung pengelolaan persampahan seperti penyapuan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.

6. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi operasional sarana prasarana dalam kegiatan penanganan persampahan melalui penyediaan alat kerja dan alat pelindung diri yang mendukung penyapuan dan pengangkutan sampah.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik.

7. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi operasional pengolahan sampah pada unit pengolahan sampah seperti pemenuhan kebutuhan bahan bakar maupun listrik, pemeliharaan sarana prasarana pengolahan sampah, serta pengujian lingkungan sarana pengolahan sampah.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

8. Sub Kegiatan Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini meliputi pengolahan sampah pada mitra serta pemrosesan akhir pada fasilitas TPA/TPST yang saat ini berada di TPA Regional Piyungan.

Indikator pada subkegiatan ini yaitu jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional.

H. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah terkait proses perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan. Sub kegiatan ini merujuk pada kegiatan teknis perencanaan yang menghasilkan dokumen perencanaan sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD.

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan perencanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup tiap tahunnya meliputi:

- Penyusunan Renja (tahun $n+1$) dan Renja Perubahan (tahun n)
- Penyusunan Renstra 5 tahunan
- Workshop inovasi perangkat daerah
- Manajemen risiko

2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah bagian dari proses penganggaran daerah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup setelah penetapan APBD, sebagai dasar pelaksanaan anggaran dan kegiatan di lingkungan Dinas.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan perencanaan penganggaran setiap tahunnya dari tahun 2025 sampai dengan 2029, meliputi anggaran murni (tahun $n+1$), pergeseran (tahun n), dan perubahan (tahun n) Dinas Lingkungan Hidup. Proses yang dilalui meliputi:

- Penyusunan RKA
- Penyusunan DPA
- Penyusunan RKPA
- Penyusunan DPPA

3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Fokus pekerjaan pada Sub Kegiatan ini adalah evaluasi dan pelaporan kinerja perangkat daerah yang wajib dilakukan setiap tahun untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Indikator Kinerja pada sub kegiatan ini yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, meliputi :

- Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
- Simpelaporan
- Simoneva
- LKIP
- Perjanjian Kinerja Murni
- Perjanjian Kinerja Perubahan
- Pengukuran Kinerja
- Dataku
- E-Walidata
- ROPK
- Infografis
- Pohon Kinerja
- Cascading
- LPPD
- LKPJ
- SPIP
- Zona Integritas
- Kota Sehat
- Kota Layak HAM
- Data Inventarisasi P3EJ
- Dokumen GAP/ GBS PPRG

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan pembayaran gaji dan tunjangan untuk ASN di Dinas Lingkungan Hidup sesuai dengan regulasi dari Peraturan Pemerintah. Sebanyak 166 ASN Gaji dan Tunjangan terbayarkan tepat waktu. Adapun gaji dan tunjangan yang dibayarkan meliputi :

- Gaji Pokok PNS dan PPPK
- Tunjangan Keluarga PNS dan PPPK
- Tunjangan Jabatan PNS

- Tunjangan Fungsional PNS dan PPPK
 - Tunjangan Fungsional umum PNS dan PPPK
 - Tunjangan Beras PNS dan PPPK
 - Tunjangan PPh/ tunjangan khusus PNS dan PPPK
 - Iuran Jaminan Kesehatan PNS dan PPPK
 - Iuran Jaminan Kecelakaan PNS dan PPPK
 - Iuran Jaminan Kematian PNS dan PPPK
 - Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat
 - Tambahan Penghasilan berdasar Beban Kerja PNS dan PPPK
 - Tambahan Penghasilan berdasar Kondisi Kerja PNS dan PPPK
 - Tambahan Penghasilan berdasar Profesi
 - Tambahan Penghasilan berdasar Prestasi Kerja
 - Belanja Insentif bagi ASN atas pemungutan Retribusi Daerah
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Pada sub kegiatan ini akan dilaksanakan koordinasi dan rapat- rapat terkait pelaksanaan tugas ASN. Target yang ingin dicapai yaitu 24 Dokumen Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN berdasarkan notulen hasil koordinasi.
 3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan

Pada sub kegiatan ini akan dilakukan pengujian dan verifikasi kelengkapan, keabsahan, penghitungan lampiran SPJ serta kelengkapan lampiran SPP SPM sesuai dengan ketersediaan dana tiap Triwulan dengan target yang ingin dicapai yaitu 3000 Dokumen berdasarkan SPJ yang diajukan.
 4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

Pada sub kegiatan ini akan dilakukan penyusunan Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca yang disusun setiap bulan berdasarkan Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran dan Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan sehingga menghasilkan 12 Dokumen.
 5. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun

Pada sub kegiatan ini dilakukan koordinasi antar unit kerja, pengumpulan data dan informasi dan penyusunan laporan akhir tahun yang berdasarkan Laporan Fungsional Bulanan, Laporan Mutasi Aset, Laporan Mutasi Persediaan, Buku Kas Umum (BKU) Pengeluaran dan Buku Kas Umum (BKU) Penerimaan sehingga tersusun 1 Dokumen Laporan Akhir tahun.
 6. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Pada Sub kegiatan ini akan dilaksanakan Pengelolaan Tindak lanjut hasil audit dari BPK, Inspektorat dan auditor lainnya. Juga akan dilakukan koordinasi penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan sesuai dengan permintaan auditor. Sehingga tersedia bahan tanggapan yang lengkap, akurat, dan tepat waktu untuk menanggapi berbagai jenis pemeriksaan

yang dilakukan oleh pihak eksternal maupun internal sesuai dengan regulasi yang berlaku. Target yang ditetapkan 3 Dokumen, namun target ini dapat berubah tergantung dengan jenis pemeriksaan yang dibutuhkan.

7. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran

Sub kegiatan ini akan melaksanakan penyusunan laporan keuangan untuk penerimaan maupun pengeluaran rutin bulanan berupa laporan fungsional, juga melakukan penyusunan laporan Triwulanan dengan reviu realisasi anggaran berdasar SPD ketersediaan dana. Untuk semesteran disusun laporan semesteran beserta Catatan Atas Laporan Keuangan sehingga menghasilkan 12 Laporan.

8. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran

Sub kegiatan ini akan dilaksanakan penyusunan Laporan Prognosis yang dilakukan pada Semester I biasanya pada bulan Juni. Laporan Prognosis yang akan disusun meliputi prediksi kinerja DLH termasuk pertumbuhan pendapatan, memproyeksikan keuangan seperti perkiraan arus kas, asset dan ekuitas termasuk juga melakukan analisis resiko dan evaluasi kinerja untuk perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Laporan Prognosis ini menghasilkan 1 Dokumen.

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah dilaksanakan meliputi:

- Penyusunan RKBMD murni dan perubahan
- Pengecekan dan penerimaan barang hasil pengadaan di DLH dengan menggunakan aplikasi SIMBADA untuk barang yang menjadi aset dan aplikasi SIMBARA untuk barang-barang pakai habis.
- menyusun buku bantu pendistribusian barang diawali dengan nota permintaan barang dilanjutkan dengan surat permintaan barang, surat penyaluran permintaan barang dan berita acara serah terima penyaluran barang.
- Untuk memantau kondisi barang di setiap ruangan menggunakan Kartu Inventaris Ruangan, dan dilakukan penandaan barang dengan pemasangan Kode Barcode di masing-masing barang.
- Rekonsiliasi Barang Persediaan dan Aset dilaksanakan setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan.
- Pengusulan penghapusan dan penyerahan barang yang rusak dan sudah tidak dimanfaatkan.

d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub Kegiatan ini melaksanakan pemeliharaan peralatan dan mesin yang meliputi :

- Genset : 1 unit
- Lift : 1 unit

- Air Conditioner : 40 unit
 - Komputer : 22 unit
 - Printer : 17 unit
 - CCTV : 18 unit
2. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sub Kegiatan ini meliputi Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung baik kantor Dinas Lingkungan Hidup maupun Bangunan Gedung yang lain milik Dinas Lingkungan Hidup seperti Gedung Laboratorium Lingkungan, Kantor Sektor dan Kantor Depo Sampah
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Sub Kegiatan ini meliputi Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas berupa bensin non subsidi kendaraan roda 2, roda 3 dan roda 4, solar non subsidi kendaraan roda 4 dan roda 6. Belanja Pembayaran Pajak, Bea dan Perijinan berupa perpanjangan STNK tahunan dan lima tahunan. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan, Kendaraan Bermotor Penumpang, Kendaraan Bermotor Angkutan Barang, Kendaraan Bermotor Beroda Dua, Kendaraan Bermotor Beroda Tiga dan Kendaraan Bermotor Khusus.
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah diselenggarakan sesuai Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, dengan metode e katalog dan pengadaan langsung.
 - f. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Sub Kegiatan ini melaksanakan penyedia Komponen Instalasi /Penerangan Bangunan Kantor pada Bangunan Gedung milik DLH yang meliputi sembilan (9) jenis barang antara lain: Kabel, isolasi listrik, rol kabel, klem kabel, lampu, stecker, stopkontak, batu baterai AA dan batu baterai AAA.
 2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Sub Kegiatan ini melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 7 paket meliputi ATK, Bahan Perabot Kantor, Peralatan Kebersihan, Bahan Komputer, Sewa Peralatan, Kertas Cover dan Belanja Modal.
 3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, yang meliputi Bahan Cetak dan Fotocopy.
 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan-undangan

Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundangan, yang meliputi penyediaan Media Masa Cetak

(koran/majalah) dan pembelian buku regulasi (perundang-undangan) yang terbaru.

5. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub Kegiatan ini melaksanakan penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang meliputi:

- Laporan belanja jamuan makan dan minum baik internal Dinas Lingkungan Hidup maupun koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota dan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang lain,
- Laporan biaya Perjalanan Dinas untuk konsultasi dan menghadiri undangan baik ke Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

6. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material

Sub Kegiatan ini melaksanakan Belanja Bahan – Bahan Bangunan dan Konstruksi berupa bahan-bahan dalam rangka perbaikan bak kendaraan, Belanja Bahan Bakar - Bahan Bakar dan Pelumas berupa bensin non subsidi keperluan bengkel, Belanja Bahan - Isi Tabung Gas meliputi gas elpiji dan gas oksigen las, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Perabotan Kantor berupa regulator las.

g. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan Administrasi Kepegawaian dilaksanakan secara rutin meliputi

- pemantauan dan penjagaan presensi online, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, satya lancana
- pengajuan usulan izin belajar, tugas belajar, diklat, pensiun, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, laporan perkawinan, karis/karsu, satya lancana
- Pencermatan SIM TPP dan pengajuan kelengkapan TPP
- Fasilitasi penilaian E PKP dan E SKP
- Fasilitasi Analisis Jabatan dan Beban Kerja
- Fasilitasi Survey Penilaian Integritas KPK
- Fasilitasi kendala Jogja Smart Service
- Fasilitasi *Employee of The Year*
- Fasilitasi LHKPN

h. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang meliputi Benda Pos dan biaya pengiriman surat.

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa meliputi 4 laporan:

- Komunikasi berupa pembayaran telpon kantor dan bantuan komunikasi Kepala OPD dan Admin JSS
- Sumber Daya Air
- Listrik berupa pembayaran Listrik Gedung DLH, Laboratorium Lingkungan, RTHP yang tersebar di Wilayah Kota Yogyakarta, Depo Sampah, Kantor Sektor dan Kebun Bibit.

- Pembayaran Retribusi Kebersihan dan Retribusi Air Limbah.
3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Sub Kegiatan ini melaksanakan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang meliputi;
- Pengadaan Penyedia Jasa Orang Perseorangan pekerjaan : Penyedia Jasa Aktivitas Pengolahan data -5; Penyediaan Jasa Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya -3; Penyediaan jasa reparasi mobil -1 sampai mobil -6.
 - Pengadaan Penyedia Jasa Lainnya pekerjaan : Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service); Belanja Jasa Tenaga pengamanan (Security); Pengangkutan dan Pengolahan Air Limbah B3.
 - Pajak Bumi dan Bangunan Kantor.
 - Pembayaran Jasa Aktivitas Pengolahan data -5, Jasa Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya -3, jasa reparasi mobil -1 sampai mobil -6, Jasa Kebersihan (Cleaning Service), Jasa Tenaga pengamanan (Security), Pajak Bumi dan bangunan, Biaya Pengangkutan dan Pengolahan Air Limbah B3.

Tabel 4. 2 Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan dan Pendanaan Pemerintah Kota Yogyakarta

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				106.602.603.874		108.462.366.726,57		111.215.557.153,18		114.023.569.221,98		117.787.860.960,33		
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				24.300.880.272		24.486.629.074,57		25.108.099.721,18		25.768.894.949,98		26.605.763.232,33		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	21.052.221.670	A	21.480.423.858,57	A	22.025.597.017,18	A	22.598.011.920,98	A	23.323.045.435,33	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	79,47	79,67		79,77		79,87		79,97		80,07			
	Nilai SPIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	Terkelola dan Terukur	Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur		Terkelola dan Terukur					
2.11.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12.095.800		12.341.828,57		12.655.064,18		12.988.948,98		13.400.528,33		
Meningkatnya kualitas perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	12.095.800	4	12.341.828,57	4	12.655.064,18	4	12.988.948,98	4	13.400.528,33		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	20		20		20		20					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4		4		4		4					
2.11.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7.335.300		7.484.500		7.674.456,61		7.878.903,42		8.126.531,15		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	4	4	7.335.300	4	7.484.500	4	7.674.456,61	4	7.878.903,42	4	8.126.531,15		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.819.000		2.876.338,46		2.949.339,93		3.025.988,54		3.123.074,9		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	4	4	2.819.000	4	2.876.338,46	4	2.949.339,93	4	3.025.988,54	4	3.123.074,9		
2.11.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1.941.500		1.980.990,11		2.031.267,64		2.084.057,02		2.150.922,28		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	20	20	1.941.500	20	1.980.990,11	20	2.031.267,64	20	2.084.057,02	20	2.150.922,28		
2.11.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				17.666.556.086		18.025.893.837		18.483.391.024		18.963.744.682		19.572.180.874		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	17.666.556.086	12	18.025.893.837	12	18.483.391.024	12	18.963.744.682	12	19.572.180.874		
	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.000	3.000		3.000		3.000		3.000		3.000			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	24	24		24		24		24		24			
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	160		157		155		153		152			
2.11.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				17.660.166.086		18.019.373.864		18.476.705.573		18.956.885.489		19.565.101.609		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	168	160	17.660.166.086	157	18.019.373.864	155	18.476.705.573	153	18.956.885.489	152	19.565.101.609		
2.11.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				545.000		556.085		570.199		585.017		603.787		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	24	24	545.000	24	556.085	24	570.199	24	585.017	24	603.787		
2.11.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				990.000		1.010.137		1.035.774		1.062.692		1.096.788		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	3.000	3.000	990.000	3.000	1.010.137	3.000	1.035.774	3.000	1.062.692	3.000	1.096.788		
2.11.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				960.000		979.526		1.004.387		1.030.489		1.063.552		
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	960.000	12	979.526	12	1.004.387	12	1.030.489	12	1.063.552		
2.11.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1.680.000		1.714.171		1.757.677		1.803.356		1.861.215		
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	24	24	1.680.000	24	1.714.171	24	1.757.677	24	1.803.356	24	1.861.215		
2.11.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				1.150.000		1.173.391		1.203.172		1.234.440		1.274.046		
Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	3	3	1.150.000	3	1.173.391	3	1.203.172	3	1.234.440	3	1.274.046		
2.11.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				790.000		806.069		826.527		848.007		875.214		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	790.000	12	806.069	12	826.527	12	848.007	12	875.214		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				275.000		280.594		287.715		295.192		304.663		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	1	275.000	1	280.594	1	287.715	1	295.192	1	304.663		
2.11.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset				0		0		0		0		0		
2.11.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup				0		0		0		0		0		
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				541.001.120		552.005.083		566.014.972		580.724.791		599.356.869		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	541.001.120	1	552.005.083	1	566.014.972	1	580.724.791	1	599.356.869		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7		7		7		7		7			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			1

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				22.653.600		23.114.374		23.701.017		24.316.968		25.097.158		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	22.653.600	1	23.114.374	1	23.701.017	1	24.316.968	1	25.097.158		
2.11.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				324.472.020		331.071.781		339.474.383		348.296.777		359.471.593		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	7	7	324.472.020	7	331.071.781	7	339.474.383	7	348.296.777	7	359.471.593		
2.11.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				17.825.500		18.188.071		18.649.684		19.134.359		19.748.269		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	17.825.500	1	18.188.071	1	18.649.684	1	19.134.359	1	19.748.269		
2.11.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				1.200.000		1.224.408		1.255.483		1.288.111		1.329.439		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	1	1.200.000	1	1.224.408	1	1.255.483	1	1.288.111	1	1.329.439		
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				174.850.000		178.406.449		182.934.405		187.688.576		193.710.410		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	174.850.000	3	178.406.449	3	182.934.405	3	187.688.576	3	193.710.410		
2.11.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		0		0		0		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset				0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.495.744.664		2.546.508.110		2.611.138.486		2.678.997.783		2.764.951.230		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.495.744.664	12	2.546.508.110	12	2.611.138.486	12	2.678.997.783	12	2.764.951.230		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.11.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.500.000		1.530.510		1.569.354		1.610.139		1.661.799		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	1.500.000	1	1.530.510	1	1.569.354	1	1.610.139	1	1.661.799		
2.11.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				128.250.000		130.858.605		134.179.796		137.666.914		142.083.844		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	4	4	128.250.000	4	130.858.605	4	134.179.796	4	137.666.914	4	142.083.844		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				2.365.994.664		2.414.118.995		2.475.389.336		2.539.720.730		2.621.205.587		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	2.365.994.664	12	2.414.118.995	12	2.475.389.336	12	2.539.720.730	12	2.621.205.587		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				336.824.000		343.675.000		352.397.471		361.555.716		373.155.934		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	99	102	336.824.000	102	343.675.000	102	352.397.471	102	361.555.716	102	373.155.934		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1				1				1			
2.11.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				116.824.000		119.200.200		122.225.501		125.401.946		129.425.364		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	99	102	116.824.000	102	119.200.200	102	122.225.501	102	125.401.946	102	129.425.364		
2.11.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				220.000.000		224.474.800		230.171.970		236.153.770		243.730.570		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	220.000.000	1	224.474.800	1	230.171.970	1	236.153.770	1	243.730.570		
Meningkatnya akuntabilitas dan kualitas pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup (Predikat)	A	A	3.248.658.602	A	3.006.205.216	A	3.082.502.704	A	3.170.883.029	A	3.282.717.797	2.11.0.00.0.00.01.00 02 - UPT Pemeliharaan Sarana Prasarana Dan Perbengkelan	
	Nilai IKM Dinas Lingkungan Hidup (Nilai)	79,47	79,67				79,77				79,87			
2.11.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				70.787.000		1.439.807		1.476.350		3.401.048		5.839.222		
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	70.787.000	1	1.439.807	1	1.476.350	1	3.401.048	1	5.839.222		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3				3				3			
2.11.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				68.851.000		1.400.429		1.435.972		3.308.031		5.679.259		
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	1	68.851.000	1	1.400.429	1	1.435.972	1	3.308.031	1	5.679.259		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1.936.000		39.378		40.378		93.017		159.963		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3	3	1.936.000	3	39.378	3	40.378	3	93.017	3	159.963		
2.11.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				237.744.000		4.835.713		4.958.443		11.472.003		19.610.606		
Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	237.744.000	12	4.835.713	12	4.958.443	12	11.472.003	12	19.610.606		
2.11.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				237.744.000		4.835.713		4.958.443		11.472.003		19.610.606		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	237.744.000	12	4.835.713	12	4.958.443	12	11.472.003	12	19.610.606		
2.11.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				2.940.127.602		2.999.929.696		3.076.067.911		3.156.009.978		3.257.267.969		
Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	182	179	2.940.127.602	177	2.999.929.696	175	3.076.067.911	173	3.156.009.978	173	3.257.267.969		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1				1		1		1			
2.11.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas				37.407.902		38.168.677		39.137.398		40.154.516		41.442.841		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
atau Kendaraan Dinas Jabatan														
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	37.407.902	1	38.168.677	1	39.137.398	1	40.154.516	1	41.442.841		
2.11.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				2.902.719.700		2.961.761.019		3.036.930.513		3.115.855.462		3.215.825.128		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	182	179	2.902.719.700	177	2.961.761.019	175	3.036.930.513	173	3.115.855.462	173	3.215.825.128		
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP				447.345.000		456.443.701		468.443.701		389.571.912		497.307.677		
Meningkatnya Perencanaan Lingkungan Hidup	Rerata penilaian kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen perencanaan lingkungan hidup (Persentase)	78,5	79,5	447.345.000	80	456.443.701	80,5	468.443.701	81	389.571.912	81	497.307.677	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota				156.235.000		159.511.500		167.791.201		140.119.412		241.369.412		
Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	101.345.000	1	159.511.500	1	167.791.201	1	140.119.412	1	241.369.412		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
			(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0		0		0		0		1			
2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota				101.345.000		159.511.500		167.791.201		140.119.412		140.119.412		
Tersedianya Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	101.345.000	1	159.511.500	1	167.791.201	1	140.119.412	1	140.119.412		
2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota				0		0		0		0		101.250.000		
RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	101.250.000		
Tersusunnya dan ditetapkan RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	54.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota				54.890.000		0		0		0		0		
RPPLH kabupaten/kota yang ditetapkan	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang di tetapkan (Dokumen)	0	1	54.890.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota				291.110.000		296.932.201		300.652.500		249.452.500		255.938.265		
Meningkatnya pemantauan KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2	3	291.110.000	3	296.932.201	3	300.652.500	3	249.452.500	3	255.938.265		
	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0		0		1		0					
	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0		1		0		0					
2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD				0		0		0		150.000.000		0		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0		
2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS				291.110.000		96.932.201		300.652.500		99.452.500		255.938.265		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi KLHS	Jumlah KLHS yang dipantau dan dievaluasi (Dokumen)	2	3	291.110.000	3	96.932.201	3	300.652.500	3	99.452.500	3	255.938.265		
2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang				0		200.000.000		0		0		0		
Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun (Dokumen)	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0	0	0		
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP				3.597.674.740		3.670.848.760		3.764.014.901		3.861.835.679		3.985.739.596		
Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku (Persentase)	53,51	61,4	268.440.400	62,28	273.897.793	63,16	280.849.319	64,04	288.148.214	65,78	297.393.301	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				368.997.500		376.500.224		386.055.800		396.088.843		408.797.116		
Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	3	268.440.400	3	273.897.793	3	280.849.319	3	288.148.214	3	297.393.301		
2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				268.440.400		273.897.793		280.849.319		288.148.214		297.393.301		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut (Dokumen)	3	3	268.440.400	3	273.897.793	3	280.849.319	3	288.148.214	3	297.393.301		
Meningkatnya pemantauan kualitas air dan udara	Persentase pemantauan kualitas air dan udara sesuai standar atau ketentuan yang berlaku (Persentase)	53,51	61,4	1.059.308.540	62,28	1.080.854.876	63,16	1.108.286.972	64,04	1.137.089.572	65,78	1.173.572.158	2.11.0.00.0.00.01.00 01 - UPT Laboratorium Lingkungan	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				1.059.308.540		1.080.854.876		1.108.286.972		1.137.089.572		1.173.572.158		
Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.059.308.540	2	1.080.854.876	2	1.108.286.972	2	1.137.089.572	2	1.173.572.158		
2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota				1.059.308.540		1.080.854.876		1.108.286.972		1.137.089.572		1.173.572.158		
Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan (Dokumen)	2	2	1.059.308.540	2	1.080.854.876	2	1.108.286.972	2	1.137.089.572	2	1.173.572.158		
Meningkatnya pengendalian pencemaran lingkungan hidup	Presentase pengendalian pencemaran lingkungan hidup (Persentase)	82,5	84,17	2.269.925.800	85	2.316.096.091	85,84	2.374.878.610	86,67	2.436.597.893	87,5	2.514.774.137	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				368.997.500		376.500.224		386.055.800		396.088.843		408.797.116		
Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.557.100	1	102.602.431	1	105.206.481	1	107.940.629	1	111.403.815		
2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK				100.557.100		102.602.431		105.206.481		107.940.629		111.403.815		
Tersedianya dokumen hasil inventarisas GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK (Dokumen)	-	1	100.557.100	1	102.602.431	1	105.206.481	1	107.940.629	1	111.403.815		
2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota				2.169.368.700		2.213.493.660		2.269.672.129		2.328.657.264		2.403.370.322		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	5	3	173.049.100	3	176.568.919	3	181.050.238	3	185.755.443	3	191.715.254		
2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota				173.049.100		176.568.919		181.050.238		185.755.443		191.715.254		
kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota (Kegiatan)	5	3	173.049.100	3	176.568.919	3	181.050.238	3	185.755.443	3	191.715.254		
Terpeliharanya kebersihan sungai	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	320.400	320.400	1.996.319.600	320.400	2.036.924.741	320.400	2.088.621.891	320.000	2.142.901.821	320.400	2.211.655.068		
2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota				1.996.319.600		2.036.924.741		2.088.621.891		2.142.901.821		2.211.655.068		
pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan pembersihan unsur pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota (M2)	320.400	320.400	1.996.319.600	320.400	2.036.924.741	320.400	2.088.621.891	320.000	2.142.901.821	320.400	2.211.655.068		
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)				14.983.919.077		15.288.691.991		15.676.718.993		16.084.561.355		16.601.151.680		
Meningkatnya pengelolaan RTH	Presentase Ruang Terbuka Hijau (Persentase)	23,329	23,334	14.983.919.077	23,335	15.288.691.991	23,337	15.676.718.993	23,338	16.084.561.355	23,34	16.601.151.680	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota				14.983.919.077		15.288.691.991		15.676.718.993		16.084.561.355		16.601.151.680		
Meningkatnya luas tutupan vegetasi	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2	3	7.741.762.372	3	7.899.229.819	3	8.099.712.271	3	8.310.210.790	3	8.576.837.086		
2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya				7.741.762.372		7.899.229.819		8.099.712.271		8.310.210.790		8.576.837.086		
Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya yang Dikelola	Unit Taman Kehati Lainnya yang dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	2	3	7.741.762.372	3	7.899.229.819	3	8.099.712.271	3	8.310.210.790	3	8.576.837.086		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Optimalisasi pengelolaan RTH	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,34	3,3951	7.242.156.705	3,4451	7.389.462.172	3,4951	7.577.006.722	3,5451	7.774.350.565	3,5951	8.024.314.594		
2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)				7.242.156.705		7.389.462.172		7.577.006.722		7.774.350.565		8.024.314.594		
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota (Ha)	3,34	3,3951	7.242.156.705	3,4451	7.389.462.172	3,4951	7.577.006.722	3,5451	7.774.350.565	3,5951	8.024.314.594		
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Meningkatnya pengendalian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Persentase pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 (Persentase)	17,58	19,07	30.662.500	19,65	31.286.155	20,23	32.080.256	20,79	32.952.378	21,33	34.087.107	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)		10	30.662.500	10	31.286.155	10	32.080.256	10	32.952.378	10	34.087.107		
2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)				30.662.500		31.286.155		32.080.256		32.952.378		34.087.107		
Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)	Jumlah Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) (Dokumen)		10	30.662.500	10	31.286.155	10	32.080.256	10	32.952.378	10	34.087.107		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Elektronik (Online Single Submission)														
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan melakukan pengelolaan lingkungan hidup (Persentase)	32,71	33,43	31.686.000	33,57	32.330.493	33,7	33.151.041	33,83	34.012.583	33,92	35.103.849	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	34	34	31.686.000	35	32.330.493	35	33.151.041	35	34.012.583	35	35.103.849		
2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				31.686.000		32.330.493		33.151.041		34.012.583		35.103.849		
Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (Badan Usaha)	34	34	31.686.000	35	32.330.493	35	33.151.041	35	34.012.583	35	35.103.849		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Kabupaten/Kota yang diawasi														
Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan (%)	78,67	79,8	463.545.000	80,27	472.973.505	80,72	484.977.573	81,16	497.581.361	81,59	513.545.851		
2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				495.231.000		505.303.998		518.128.614		531.593.944		548.649.700		
Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	156	117	463.545.000	117	472.973.505	117	484.977.573	117	497.581.361	117	513.545.851		
2.11.06.2.01.0001 - Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH				463.545.000		472.973.505		484.977.573		497.581.361		513.545.851		
Kegiatan Fasilitas Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan (Dokumen)	156	117	463.545.000	117	472.973.505	117	484.977.573	117	497.581.361	117	513.545.851		
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Kampung ProKlim (Persentase)	65,09	68,05	1.363.481.500	71,01	1.391.214.714	73,96	1.426.523.743	76,92	1.463.596.805	79,88	1.510.555.108	2.11.0.00.0.00.01.00 00 - Dinas Lingkungan Hidup	
	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan dan Sekolah Adiwiyata (Persentase)	69,35	79,68		81,29		82,9		84,52		86,13			
	Persentase Bank sampah yang aktif (minimal kategori reguler) (Persentase)	73,92	78,69		80,82		82,91		84,98		87,02			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom pok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	1.061	1.363.481.500	1.076	1.391.214.714	1.091	1.426.523.743	1.106	1.463.596.805	1.121	1.510.555.108		
2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom pok masyarakat				1.363.481.500		1.391.214.714		1.426.523.743		1.463.596.805		1.510.555.108		
Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom pok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala kabupaten/kota yang terdaftar di kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelom pok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH (Lembaga)	15	1.061	1.363.481.500	1.076	1.391.214.714	1.091	1.426.523.743	1.106	1.463.596.805	1.121	1.510.555.108		
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya penanganan sampah	Persentase sampah yang tertangani (Persentase)	65,12	67,15	59.588.872.035	67,78	60.800.909.685	68,4	62.344.036.815	69,03	63.964.258.309	69,66	66.016.499.090	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup	
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah		9	59.588.872.035	9	60.800.909.685	9	62.344.036.815	9	63.964.258.309	9	66.016.499.090		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
	dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)															
	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		1				1				1					1
	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)		86				86				86					86
	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPSTkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)		1				1				1					1
2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan				28.062.432.300		28.633.222.200		29.359.933.400		30.122.950.900		31.089.421.150				
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada Jakstrada (Dokumen)		9	28.062.432.300	9	28.633.222.200	9	29.359.933.400	9	30.122.950.900	9	31.089.421.150				

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah				4.117.321.375		4.201.067.600		4.307.690.700		4.419.640.750		4.561.441.300		
Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik (Unit)		86	4.117.321.375	86	4.201.067.600	86	4.307.690.700	86	4.419.640.750	86	4.561.441.300		
2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17.522.046.460		17.878.444.885		18.332.199.815		18.808.624.259		19.412.083.540		
Sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan (Ton)		1	17.522.046.460	1	17.878.444.885	1	18.332.199.815	1	18.808.624.259	1	19.412.083.540		
2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional				9.887.071.900		10.088.175.000		10.344.212.900		10.613.042.400		10.953.553.100		
Sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional (Ton)		1	9.887.071.900	1	10.088.175.000	1	10.344.212.900	1	10.613.042.400	1	10.953.553.100		
Meningkatnya pengurangan sampah	Persentase sampah yang berkurang (Persentase)	18,95	19,16	1.794.537.750	19,24	1.831.038.648	19,31	1.877.510.409	19,39	1.926.303.890	19,46	1.988.107.770		
2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah				61.383.409.785		62.631.948.333		64.221.547.224		65.890.562.199		68.004.606.860		
Meningkatnya pengurangan sampah melalui kegiatan daur ulang	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	1.794.537.750	1	1.831.038.648	1	1.877.510.409	1	1.926.303.890	1	1.988.107.770		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELIN E TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGA N
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU	TARGE T	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		45		45		45		45		45			
2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan				1.404.846.250		1.433.420.823		1.469.801.043		1.507.998.813		1.556.381.718		
Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat (Kelompok)		45	1.404.846.250	45	1.433.420.823	45	1.469.801.043	45	1.507.998.813	45	1.556.381.718		
2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota				24.480.000		24.977.923		25.611.863		26.277.474		27.120.565		
Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan (Dokumen)	1	1	24.480.000	1	24.977.923	1	25.611.863	1	26.277.474	1	27.120.565		
2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota				365.211.500		372.639.902		382.097.503		392.027.603		404.605.487		
Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah kabupaten/kota	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota (Dokumen)	1	1	365.211.500	1	372.639.902	1	382.097.503	1	392.027.603	1	404.605.487		

4.4 Subkegiatan yang mendukung program prioritas Pembangunan daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta selaku Perangkat Daerah memiliki Program Prioritas dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kota Yogyakarta yang dijabarkan dalam Program, Kegiatan, dan Subkegiatan. Adapun Program Prioritas Inspektorat Daerah Kota Yogyakarta dijabarkan pada matriks berikut:

Tabel 4. 3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup				
1.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.02 - Program Perencanaan Lingkungan Hidup	- Tersusunnya dan ditetapkan RPPLH Kabupaten/Kota - Tersedianya Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	2.11.02.2.01 - Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	2.11.02.2.01.0002 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya penetapan RPPLH kabupaten/kota	2.11.02.2.01.0003 - Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	2.11.02.2.01.0004 - Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota	
			Meningkatnya pemantauan KLHS	2.11.02.2.02 - Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	
			Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi KLHS	2.11.02.2.02.0004 - Pemantauan dan Evaluasi KLHS	
				2.11.02.2.02.0005 - Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang	
				2.11.02.2.02.0002 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	
2.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.03 - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	- Terlaksananya inventarisasi emisi Gas Rumah Kaca - Terwujudnya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01 - Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			Terlaksananya pemantauan kualitas air dan udara secara berkala	2.11.03.2.01.0001 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
			Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	2.11.03.2.01.0005 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	
			Terlaksananya pengujian air dan udara	2.11.03.2.01.0015 - Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	
			- Terpeliharanya kebersihan Sungai - Terlaksananya pemantauan sumber pencemar lingkungan hidup	2.11.03.2.03 - Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0011 - Pelaksanaan Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	
			Terselenggaranya kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembersihan unsur pencemar dengan dampak di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2.11.03.2.03.0012 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembersihan Unsur Pencemar di kabupaten/kota	
3.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.04 - Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	- Meningkatnya luas tutupan vegetasi - Optimalisasi pengelolaan RTH	2.11.04.2.01 - Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	
			- Terkelolanya RTHP lingkungan permukiman - Tersusunnya dokumen DED RTHP - Terbangunnya RTHP lingkungan permukiman di lokasi baru	2.11.04.2.01.0004 - Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
			Terkelolanya taman keanekaragaman hayati lainnya	2.11.04.2.01.0008 - Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.05 - Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3)	Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan limbah B3	2.11.05.2.01 - Penyimpanan sementara Limbah B3	
			Terfasilitasinya Pemenuhan Rincian Teknis untuk di Integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	2.11.05.2.01.0005 - Fasilitasi Pemenuhan Rincian Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 untuk di integrasikan dengan persetujuan lingkungan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)	
5.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.06 - Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	- Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota - Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.11.06.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	2.11.06.2.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	
			Terlaksananya monitoring kepatuhan pelaku usaha dan/atau	2.11.06.2.01.0009 - Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kegiatan dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup	terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
6.	Kota Hijau, Sehat, dan Berkelanjutan	2.11.08 - Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kota	2.11.08.2.01 - Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
			Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	2.11.08.2.01.0005 - Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/keompok masyarakat	
7.	Mempercepat Penyelesaian Masalah Sampah	2.11.11 - Program Pengelolaan Persampahan	Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah	2.11.11.2.01 - Pengelolaan Sampah	
			Terlaksananya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01.0004 - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
			Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana	2.11.11.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	
			Tersedianya rencana kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	2.11.11.2.01.0008 - Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Terlaksananya pembinaan dan pengawasan	2.11.11.2.01.0011 - Pelaksanaan pemantauan, pembinaan,	

No.	Program Strategis Walikota	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/ Subkegiatan	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			pengurangan sampah (masyarakat, pelaku usaha/kegiatan, pelaku daur ulang)	verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah kabupaten/kota	
			Tersedianya sarana prasarana pengelolaan sampah dalam kondisi baik	2.11.11.2.01.0015 - Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah	
			Terlaksananya pendataan pengumpulan dan penanganan sampah pada fasilitas Depo/ TPS/ Transfer Point/UPS	2.11.11.2.01.0017 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	
			Terlaksananya kerjasama penanganan sampah	2.11.11.2.01.0020 - Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	
			Terlaksananya kegiatan daur ulang sampah	2.11.11.2.01.0019 - Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan sosial di wilayah Kota Yogyakarta sesuai Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029, diperlukan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta sebagai pedoman dalam pencapaian kinerja pemerintah, IKU Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta antara lain:

Tabel 4. 4 Indikator Kinerja Utama Rancangan Akhir Renstra PD Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.11.0.00.0.00.01.0000 - Dinas Lingkungan Hidup									

2.	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase	73,33	76,67	77,32	77,97	77,62	79,27	80,09	
3.	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Persentase	62,6	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	71,06	
4.	Capain Pengelolaan Persampahan	Persentase	84,06	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	89,12	
5.	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Predikat	A	A	A	A	A	A	A	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Di samping Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta yang mendukung langsung pencapaian kinerja Visi dan Misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2025-2029, terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang merupakan indikator kinerja yang selaras dengan indikator kinerja pada level Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Pusat. Dinas Llingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Kunci Rancangan Akhir Renstra Pemerintah Kota Yogyakarta

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP										
2.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	positif	Indeks	55.53	55.42	57.5	57.58	57.66	57.73	57.81	
3.	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	positif	Persentase	50	33.30	33.43	33.57	33.70	33.83	33.92	
4.	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	positif	Persentase	84.06	85.62	86.32	87.02	87.72	88.42	89.12	

BAB V

PENUTUP

Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah, yang nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Visi dan Misi RPJMD, Analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD 2025-2029, dan isu strategis aktual.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun masih bersifat indikatif dan kebutuhan anggaran telah disesuaikan dengan kemampuan daerah untuk menunjang visi dan misi Pembangunan Kota Yogyakarta tahun 2025-2029. Perhitungan kebutuhan disesuaikan standarisasi harga barang dan jasa sesuai aturan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Pusat yang harus segera dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Indikator dan target kinerja pembangunan daerah yang tercantum dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2025-2029 ini wajib dipenuhi untuk mendukung tercapainya kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta di bidang Lingkungan Hidup.

Pelaksanaan Renstra ini akan dievaluasi secara berkala untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan kebijakan nasional, dinamika Pembangunan Daerah, serta kebutuhan organisasi. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam melakukan penyesuaian strategi guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.

Dengan disusunnya Renstra ini diharapkan menjadi pedoman dalam perencanaan yang baik, sistematis, pelaksanaan kegiatan yang akuntabel, dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten, serta didukung oleh sarana prasarana juga anggaran yang memadai. Sehingga, dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta sebagai instansi yang kredibel dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 15 September 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Yogyakarta



Rajwan Gading, S.I.P., M.Si.
Pemimpin Tingkat I/IVb
NIP. 197303021992031004

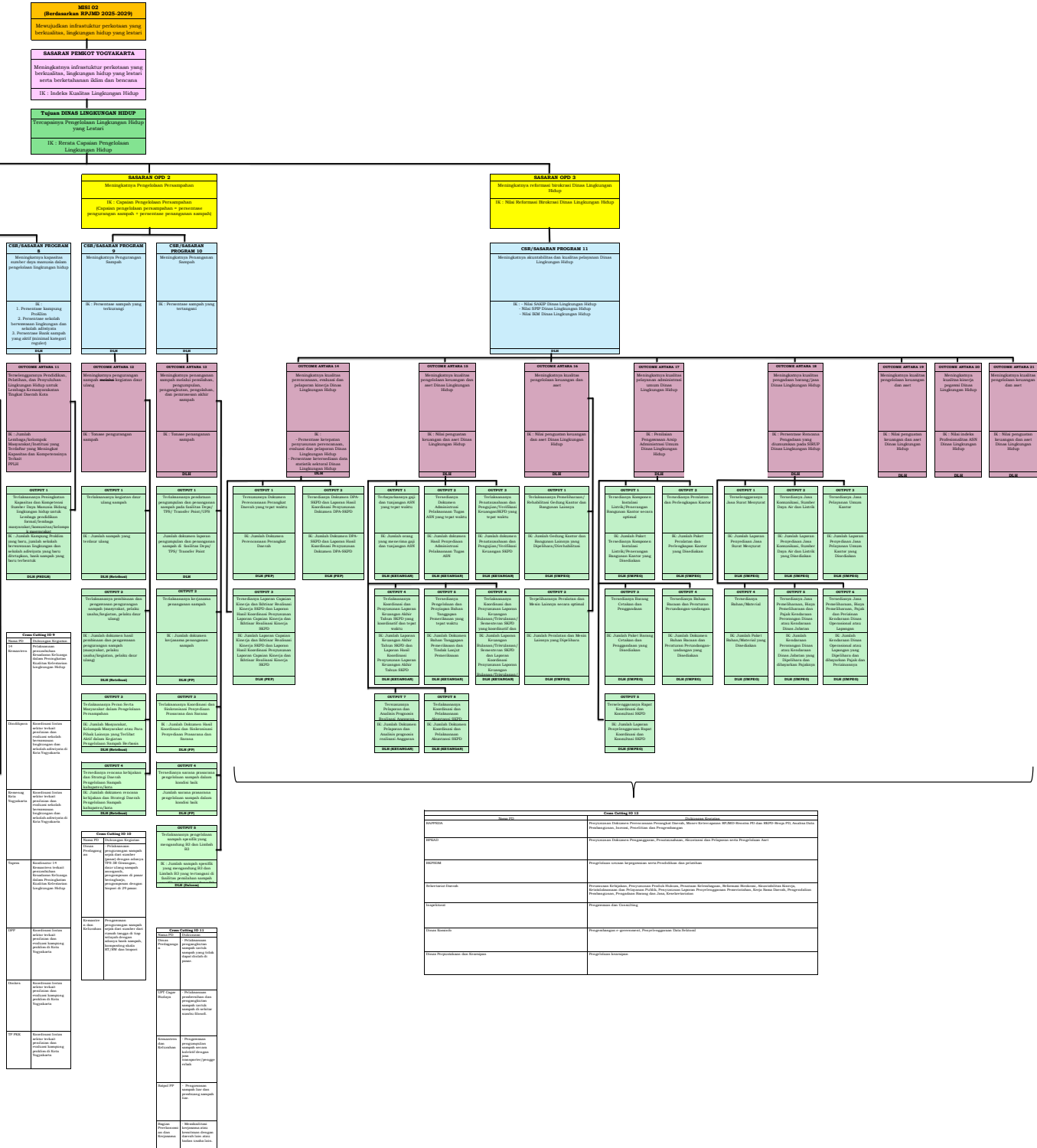
LAMPIRAN 1

POHON KINERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

**POHON KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2025-2029**



LAMPIRAN 2

CASCADING KINERJA

PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2025-2029

CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA YOGYAKARTA

[illegible]

LAMPIRAN 3
DATA KINERJA
TAHUN 2025-2029

DATA KINERJA TUJUAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025-2030

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target
									2025	2026	2027	2028	2029		2030
1. Tercapainya Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Lestari	Rerata Capaian Pengelolaan Lingkungan Hidup	Komposit persentase capaian kualitas lingkungan hidup dan capaian pengelolaan persampahan				(Capaian kualitas lingkungan hidup + Capaian pengelolaan persampahan) dibagi 2	Persen	73,33	76,67	77,32	77,97	78,62	79,27	79,27	80,09
						Sumber data:									
						Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	persen								
						Capaian pengelolaan persampahan	persen								
			1.1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang berkualitas	Presentase Capaian Kualitas Lingkungan Hidup	Merupakan penghitungan komposit dari 3 indikator yaitu : 1) persentase pemantauan LH dan hasil pencapaian Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU), 2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Tutupan Lahan (Indeks Kualitas Lahan (IKL)) yang diukur berdasarkan luas tutupan vegetasi hutan dan non hutan), dan 3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	(40% Pemantauan Kualitas LH + 30% Pengelolaan RTH + 30% Pengendalian Pencemaran LH)	Persen	62,60	67,71	68,31	68,91	69,52	70,12	70,12	71,06
						Sumber data:									
						1) Pemantauan Kualitas Lingkungan Hidup	Persen	53,51	60,53	61,40	62,28	63,16	64,04	64,04	65,78
						2) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan Inventarisasi Tutupan Lahan	Persen	61,6646	61,6661	61,6669	61,6676	61,6684	61,6692	61,6692	61,6699
						Perhitungan nomor 2 diperoleh dari:									
						(Persentase RTH/2)+(Persentase ketercapaian IKL/2)									
						Sumber data:									
						Persentase Ketercapaian IKL	Persen	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
						Luas Ruang Terbuka Hijau Privat	m2	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919
						Luas Ruang Terbuka Hijau Publik	m2	2.643.507	2.644.507	2.645.007	2.645.507	2.646.007	2.646.507	2.646.507	2.647.007
						Luas Kota Yogyakarta	m2	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50	32.819.062,50
						Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	30,9329	31,7507	31,7514	31,7521	31,7528	31,7535	31,7535	31,7542
						Luas Tutupan Vegetasi	m2	5.083.200,53	5.083.700,53	5.084.200,53	5.084.700,53	5.085.200,53	5.085.700,53	5.085.700,53	5.086.200,53
						3) Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	persen	82,50%	83,34	84,17	85	85,84	86,67	86,67	87,5

Tujuan OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Sasaran Strategis OPD	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
									2025	2026	2027	2028	2029		
			1.2 Meningkatkan Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan	Capaian Pengelolaan Persampahan dihitung dari persentase pengurangan sampah ditambah persentase penanganan sampah	Capaian pengelolaan persampahan = persentase pengurangan sampah + persentase penanganan sampah	Persen	84,06	85,62	86,32	87,02	87,72	88,42	88,42	89,12
						Sumber Data :									
						Persentase sampah yang berkurang	Persen	18,95%	19,09	19,16	19,24	19,31	19,39	19,39	19,46
						Persentase sampah yang tertangani	Persen	65,12%	66,53	67,16	67,78	68,41	69,03	69,03	69,66
			1.3. Meningkatkan reformasi birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur pelaksanaan dan pencapaian Reformasi Birokrasi level Perangkat Daerah, dengan kriteria: AA (>90-100) : istimewa A (>80-90): Sangat baik BB (>70-80): baik B (>60-70): cukup baik CC (>50-60): cukup C (>30-50): buruk D (>0-30): sangat buruk	Hasil evaluasi reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)	A (87,55-90,55)
						Sumber Data: Hasil penilaian RB DLH oleh Inspektorat dengan 8 parameter : 1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja DLH 2. Nilai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) DLH 3. Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset DLH 4. Indeks Kepuasan Masyarakat 5. Capaian persentase Rencana Pengadaan yang diumumkan pada SIRUP 6. IP ASN DLH 7. Penilaian Pengawasan arsip internal 8. Penilaian Indeks Pembangunan Statistik	Nilai	A (87,297)	A (87,30-90,30)	A (87,35-90,35)	A (87,40-90,40)	A (87,45-90,45)	A (87,50-90,50)	A (87,50-90,50)	A (87,55-90,55)

**DATA KINERJA PROGRAM KEGIATAN PERANGKAT DAERAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
TAHUN ANGGARAN 2025-2030**

[illegible]

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	2025	2026	Target 2027	2028	2029	Kondisi Akhir	Target 2030				
					1.1.3.1. Penyimpanan sementara Limbah B3	Terselenggaranya pemenuhan komitmen izin penyimpanan sementara limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Jumlah dokumen izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3	Dokumen izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Usaha dan/atau Kegiatan yang telah diterbitkan	Jumlah total izin Penyimpanan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan	dokumen	209	-	229	239	249	259	259	269				
					Sumber Data:																	
					Jumlah total izin Penyimpananan Limbah B3 dan/atau Rincian Teknis penyimpanan Limbah B3 yang telah diterbitkan	dokumen	209	-	229	239	249	259	259	269								
	1.1.4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap Izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase kepatuhan usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup	Menunjukkan usaha dan/atau kegiatan yang sudah diawasi dan dibina dalam melakukan pengelolaan lingkungan hidup					(Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang wajib diawasi) * 100%	persen	32.71	33.30	33.43	33.57	33.70	33.83	33.83	33.92				
									Sumber Data:													
									Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang sudah dibina dan diawasi	Usaha	328	331	334	337	340	343	343	346				
		Meningkatnya penerbitan rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	Persentase usaha yang memiliki rekomendasi dan atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang diterbitkan	Menunjukkan usaha yang telah memiliki rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan SLO					(Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan) / (Jumlah total usaha) x 100%	Persen	78,67%	79,32%	79,80%	80,27%	80,72%	81,16%	81,16%	81,59%				
									Sumber Data:													
									Jumlah usaha yang telah memiliki dokumen lingkungan	Usaha	5358	5486	5603	5720	5837	5954	5954	6071				
									Jumlah total usaha	Usaha	6811	6916	7021	7126	7231	7336	7336	7441				
					1.1.4.1 Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dilakukan pembinaan dan pengawasan	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan (seperti: kantor, RS, hotel, toko, dan lain-lain yang berizin lingkungan) secara langsung dan/atau tidak langsung (swapantau)	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang telah dibina dan diawasi	Usaha	328	331	334	337	340	343	343	346				
									1.(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan dibagi jumlah total usaha) x 100%	Persentase	78,97%	79.32%	-	-	-	-	-	-	-	-		
									Sumber data:													
									Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	Dokumen	5379	5486	-	-	-	-	-	-	-	-		
									2.(Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan dibagi Jumlah Total Usaha) dikali 100%	Persentase	78,67%	-	79.80%	80.27%	80.72%	81.16%	81.16%	81.59%				
									Sumber data:													
									Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasional yang diberikan	dokumen	5358	-	5603	5720	5837	5954	5954	6071				
									Jumlah total usaha	usaha	6811	6916	7021	7126	7231	7336	7336	7441				
	1.1.5. Program Pengelolaan Keanekaragaman an Hayati (Kehati)	Meningkatnya pengelolaan RTH	Presentase Ruang Terbuka Hijau	Indikator yang digunakan untuk mengukur pengelolaan RTH dan kualitas lahan dengan melihat tutupan vegetasi existing					Persentase Ruang Terbuka Hijau = (Luas Ruang Terbuka Hijau Privat + Luas Ruang Terbuka Hijau Publik) / (Luas kota Yogyakarta) x 100%	%	23,33%	23,332%	23,334%	23,335%	23,337%	23,338%	23,338%	23,340%				
									Sumber data:													
									Luas Ruang Terbuka Hijau Privat	m2	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919	5.012.919				
Luas Ruang Terbuka Hijau Publik									m2	2.643.507	2.644.507	2.645.007	2.645.507	2.646.007	2.646.507	2.646.507	2.647.007					

Sasaran	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Definisi Operasional	Formula Perhitungan	Satuan	Kondisi Awal 2024	Target					Kondisi Akhir	Target 2030
												2025	2026	2027	2028	2029		
								dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	
					1.3.1.4 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan dan aset Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	
					1.3.1.5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Nilai Penguatan Keuangan dan Aset Dinas Lingkungan Hidup	Mengukur kualitas laporan keuangan Perangkat Daerah dengan kriteria: Nilai 5: Sangat Baik Nilai 3 – 4: Baik Nilai 1 – 2: Sedang Nilai 0: Buruk	Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengelolaan keuangan Dinas Lingkungan Hidup oleh BPKAD	Nilai	5	5	5	5	5	5	5	
					1.3.1.6 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum Dinas Lingkungan Hidup	Penilaian Pengawasan Arsip Administrasi Umum Dinas Lingkungan Hidup	Memastikan pencapaian target isik dan keuangan seimbang	Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	79,17	79,27	79,37	79,47	79,57	79,67	79,67	79,77
									Sumber Data :									
									Hasil penilaian pengawasan arsip administrasi umum	Nilai	79,17	79,27	79,37	79,47	79,57	79,67	79,67	79,77
					1.3.1.7. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Pegawai Dinas Lingkungan Hidup	Nilai Indeks Profesionalitas ASN Dinas Lingkungan Hidup		Hasil nilai IP ASN DLH	Nilai	91,00	87,82 - 91,2	87,84 - 91,4	87,86 - 91,6	87,88 - 91,8	87,90 - 92	87,90 - 92	87,92 - 92,2
									Sumber Data :									
									Hasil nilai IP ASN DLH	Nilai								
					1.3.1.8 Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan barang/jasa Dinas Lingkungan Hidup	Persentase Rencana Pengadaan yg diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	Memastikan waktu dan pelaksanaan sesuai perencanaan	Rencana pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup dibagi pengadaan yang diumumkan pada SIRUP Dinas Lingkungan Hidup	Persen	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
									Sumber Data :									
									Jumlah belanja DLH yang diinputkan pada SIRUP	Rupiah	96.147.601.029,00	115.194.294.976,00	112.890.409.076	110.632.600.895	111.761.504.986	109.526.274.886	109.526.274.886	110.621.537.635
									Jumlah belanja pada DPA DLH	Rupiah	96.147.601.029,00	115.194.294.976,00	112.890.409.076	110.632.600.895	111.761.504.986	109.526.274.886	109.526.274.886	110.621.537.635